

PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRECHTING) PADA  
MASYARAKAT KECAMATAN PARIGI DESA MANIMBAHOI DUSUN  
PATTIRO KABUPATEN GOWA (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum  
Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh :

**MASYKUR AL-FARHIY**

NIM : 10200114113

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Masykur Al-Farhiy  
Nim : 10200114113  
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Tempat/Tanggal Lahir : Sumberjo, 27 Maret 1996  
Alamat : Jl. Macanda BTN Taman Zarindah No.7 Blok I  
Judul : Perbuatan Main Hakim Sendiri (Eigenrechting)  
Pada Masyarakat Kecamatan Parigi Desa  
Manimbahoi Dusun Pattiro Kabupaten Gowa  
(Perspektif Hukum Islam).

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "Perbuatan Main Hakim Sendiri (Eigenrechting) Pada Masyarakat Kecamatan Parigi Desa Manimbahoi Dusun Pattiro Kabupaten Gowa (Perspektif Hukum Islam)" adalah benar hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini adalah duplikat, tiruan, plagiat, dibuat atau dibantu orang lain secara keseluruhan (tanpa campur tangan penyusun), maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal demi Hukum.

Samata, 15 Maret 2019



Masykur Al-Farhiy

NIM : 10200114113

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **“Perbuatan Main Hakim Sendiri (Eigenrechting) pada Masyarakat Kecamatan Parigi Desa Manimbahoi Dusun Pattiro Kabupaten Gowa (Perspektif Hukum Islam)”** yang disusun oleh saudara (i) **Masykur Al-Farhiy NIM: 10200114113**, mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2019 M, bertepatan 13 Jumadil Akhir 1440 H dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar dengan beberapa perbaikan.

Samata, 23 Maret 2019 M  
16 Jumadil Akhir 1440 H

### DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam, M.Ag
Sekretaris	: Dr. Hamsir, S.H., M.Hum
Munaqisy I	: Drs. H. M. Gazali Sayuti, M.H.I
Munaqisy II	: Subehan Khalik, S.Ag., M.Ag
Pembimbing I	: Dr. Hamzah Hasan, M.H.I
Pembimbing II	: Dr. Hj. Rahmatiah HL, M.Pd

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. Darussalam, M.Ag

Nip: 19621016 199003 1 003



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Swt, dengan segala rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya. Selawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw, keluarga, dan para sahabatnya, serta orang-orang yang mengikutinya dalam menyebarkan risalah Allah Swt, yang telah menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia dan mampu merubah zaman kegelapan menjadi jalan yang terang dengan adanya ilmu pengetahuan yang di bawah oleh mereka.

Kebesaran jiwa, cinta, dan kasih sayang yang tidak bertepi serta doa yang tiada terputus dari kedua orang tuaku dan saudariku yang tercinta, **Ayahku Jus Kuswanto, Ibuku Musdalifah** dan **Kakakku Ulfah Sari** yang senantiasa memberikan penulis curahan kasih sayang, nasihat, perhatian, bimbingan serta doa restu yang selalu diberikan sampai saat ini.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dalam menyusun skripsi ini tidak sedikit kekurangan dan kesulitan yang dialami oleh penulis, baik dalam kepustakaan, penelitian lapangan, maupun hal-hal lainnya. Tetapi berkat ketekunan, bimbingan, petunjuk serta bantuan dari pihak lain akhirnya dapatlah disusun dan diselesaikan skripsi ini menurut kemampuan penulis. Kendatipun isinya mungkin terdapat banyak kekurangan dan kelemahan, baik mengenai materinya, bahasanya serta sistematikanya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini disusun dan diselesaikan berkat petunjuk, bimbingan dan bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu, sudah pada tempatnyalah

penulis menghanturkan ucapan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah rela memberikan, baik berupa moril maupun berupa materil dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. Penghargaan dan ucapan terima kasih yang terdalam dan tak terhingga terutama kepada yang terhormat

1. Bapak **Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si.** selaku Rektor UIN Alauddin Makassar;
2. Bapak **Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.** selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar beserta jajarannya;
3. Ibunda **Dra. Nila Sastrawati, M. Si.** selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan UIN Alauddin Makassar beserta Ibunda **Dr. Kurniati, M.Hi.** selaku Sekertaris Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan;
4. Bapak **Dr. Hamzah Hasan, M.H.I.** selaku Pembimbing I dan Ibunda **Dr. Hj. Rahmatiah HL, M.Pd.** selaku Pembimbing II. Kedua, beliau di tengah kesibukan dan aktifitasnya bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan petunjuk dan bimbingan dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini;
5. Bapak **Drs. H. M. Gazali Sayuti, M.H.I.** selaku Penguji I dan Bapak **Subehan Khalik, S. Ag., M.Ag.** selaku Penguji II;
6. Kepada seluruh staf Pengadilan Negeri Sungguminasa yang telah memberikan inforasi serta data yang lengkap untuk penulis menyusun penyelesaian skripsi ini dan kepada masyarakat Kecamatan Parigi Desa Manimbahoi Dusun Pattiro yang telah bersedia dan meluangkan waktu untuk membantu penulis melakukan penelitian dan mengambil data untuk menyusun penyelesaian skripsi ini;
7. Dosen-dosen Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis serta seluruh staf Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan beserta staf

Akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang telah banyak membantu dalam pengurusan ujian sarjana penulis;

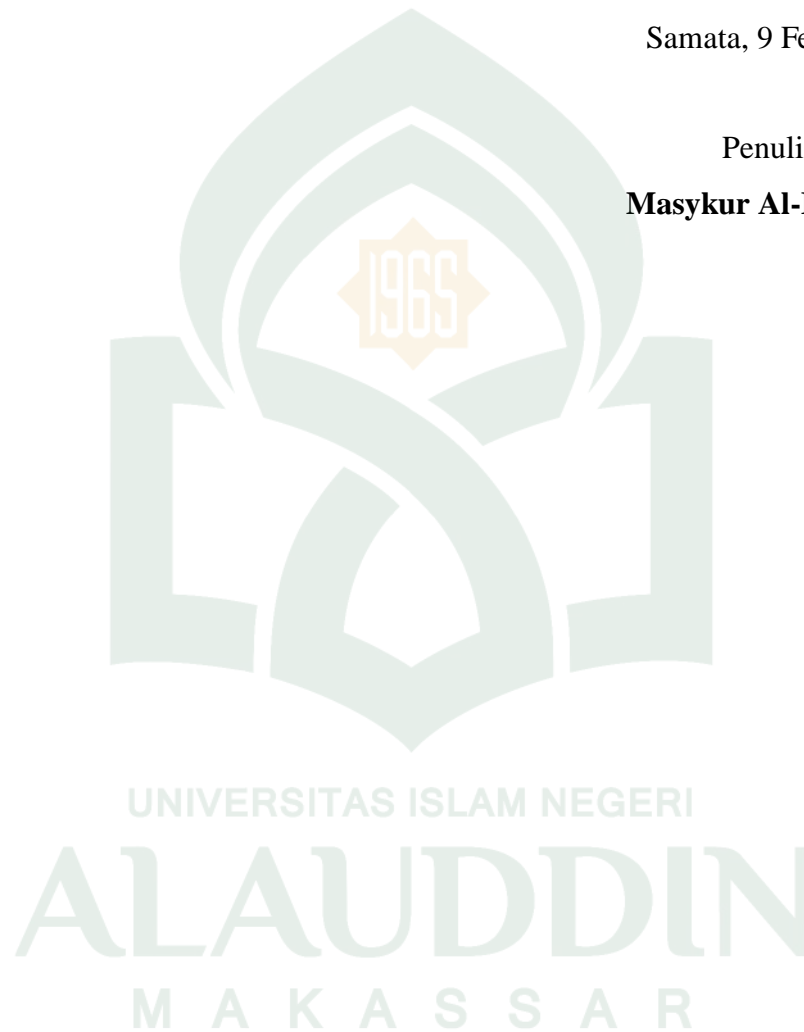
8. Keluarga besar Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, terkhusus Marjinal'014, dan yang paling special kepada HPK C 2014 yang telah memberikan semangat inspirasi dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Syariah dan Hukum Cabang Gowa Raya, terima kasih telah memberikan ilmu yang bermanfaat serta pengalaman dalam berHMI;
10. Keluarga besar Komunitas Perpustakaan Rakyat Rumah Belajar Paradox dan Komunitas Literasi Lima yang telah memberikan fasilitas kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan terima kasih telah memberikan pemahaman kepada penulis yang luas tentang kehidupan;
11. Keluarga besar KKN 58 Kabupaten Sinjai yang telah memberikan pengalaman baru selama masa berKKN, Rama, Furqan, Baraq, Eco, Arafik, Cening, Vita, Eni, Risma, Desi, Syba;
12. Kepada Saudara tak sedarah Kanda Abu Bakar Mangun, Kanda Haris, Kanda Wawan, Andi Muh. Tajrin, Muh. Sabiq Al Khair, Muh. Qurshihul Husna, Alamsyah Adri, Andi Pallawa Rukka, Irfan Jaya, Asnawi, Muh. Fikih Indrawan, Andi Reza Putra Wangsa, Salman Abdi Putra, Bang Ucai, Iwan Mazkrib, Wandu, Imam, Uppi, terima kasih atas kesetiakawanan, dukungan dan motivasinya selama ini;
13. Terima kasih untuk tidak pernah bosan, senantiasa menemani, meluangkan waktu yang begitu besar, memberikan motivasi, serta mengajarkan pengalaman hidup untuk tetap sabar dan tetap bersikap dewasa. Kepada **Salmia Daeng Sunggu**.

Atas segala bantuan, kerjasama, uluran tangan yang telah diberikan dengan ikhlas hati kepada penulis selama menyelesaikan studi hingga rampungnya skripsi ini.

Akhirnya dengan penuh rendah hati penulis mengharap tegur sapa manakala terdapat kekeliruan menuju kebenaran dengan mendahulukan ucapan terima kasih yang tak terhingga.

Samata, 9 Februari 2019

Penulis  
**Masykur Al-Farhiy**



## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN LITERASI .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Fokus dan Deskripsi Fokus .....	6
D. Kajian Pustaka .....	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	12
<b>BAB II TINJAUAN TEORETIS .....</b>	<b>14</b>
A. Tindak Pidana .....	14
1. Pengertian Tindak Pidana .....	14
2. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	17
3. Jenis-jenis Tindak Pidana .....	19
B. Tindakan Main Hakim Sendiri ( <i>Eigenrechting</i> ) .....	23
C. Tindakan Main Hakim Sendiri ( <i>Eigenrchting</i> ) dalam Perspektif Hukum Islam .....	31
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	39



B. Pendekatan Penelitian .....	39
C. Sumber Data .....	40
D. Metode Pengumpulan Dan Pengolahan Data .....	40
E. Instrument Penelitian .....	42
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	43
<b>BAB IV PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRECHTING)</b>	
<b>PADA MASYARAKAT KECAMATAN PARIGI DESA</b>	
<b>MANIMBAHOI DUSUN PETTIRO KABUPATEN GOWA</b>	
<b>(PERSPEKTIF HUKUM ISLAM).....</b>	<b>45</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	44
B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri Pada	
Masyarakat .....	50
C. Upaya Penegak Hukum Dalam Mengantisipasi/Mencegah Terjadinya	
Tindakan Main Hakim Sendiri .....	53
D. Penerapan Hukum Pada Masyarakat Yang Main Hakim Sendiri	
Dalam Perspektif Hukum Islam .....	59
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan .....	66
B. Implikasi Peniltian .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	A lif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	B a	B	Be
ت	T a	T	Te
ث	ṡ a	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Ji m	J	Je
ح	ḥ a	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	K ha	Kh	ka dan ha
د	D al	D	De
ذ	Ẓ al	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	R a	R	Er
ز	Z ai	Z	Zet

س	in	S	S	Es
ش	yin	S	Sy	es dan ye
ص	ad	ṣ	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ad	ḍ	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط		ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	a	ẓ	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ain	‘	‘	apostrop terbalik
غ	ain	G	G	Ge
ف	a	F	F	Ef
ق	af	Q	Q	Qi
ك	af	K	K	Ka
ل	am	L	L	El
م	im	M	M	Em
ن	un	N	N	En
و	au	W	W	We
ه	a	H	H	Ha
ء	amzah	H	,	Apostop
ي	a	Y	Y	Ye

Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fathah</i>	A	A
	<i>Kasrah</i>	I	I
	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	<i>fathah</i> <i>dan alif atau ya</i>	a	a dan garis di atas

	<i>kasrah</i> <i>dan ya</i>	I	i dan garis di atas
	<i>dammah</i> <i>dan wau</i>	U	u dan garis di atas

#### 4. Ta Marbutah

*Transliterasi* untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, yang transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu transliterasinya dengan [h].

#### 5. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (◌ْ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (◌ِ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah*(i).

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif* (◌َ) (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar



(-).

## **7. Hamzah**

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

## **8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari al-Qur'an), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

## **9. Lafz al-Jalalah (الله)**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz a-ljalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

## **10. Huruf Kapital**

Kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama

diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR).



## ABSTRAK

**Nama : Masykur Al-Farhiy**

**NIM : 10200114113**

**Judul Skripsi : Perbuatan Main Hakim Sendiri (Eigenrechting) Pada Masyarakat Kecamatan Parigi Desa Manimbahoi Dusun Pattiro Kabupaten Gowa (Perspektif Hukum Islam)**

Skripsi ini membahas tentang perbuatan main hakim sendiri (eigenrechting) yang dilakukan masyarakat kecamatan parigi desa manimbahoi dusun pattiro kabupaten gowa. Pokok masalah tersebut menimbulkan sub masalah atau pertanyaan peneliti, yaitu : 1) Faktor apa yang menyebabkan terjadinya main hakim sendiri pada masyarakat? 2) Bagaimana upaya penegak hukum dalam mengantisipasi/mencegah terjadinya main hakim sendiri pada masyarakat? 3) Bagaimana penerapan hukum pada masyarakat yang main hakim sendiri dalam perspektif hukum Islam?

Jenis penelitian ini yuridis-empiris, teknik pendekatan yuridis normatif dan yuridis empirik. Pendekatan penelitian ini, yuridis, sosiologis, teologi normatif. Sumber data penelitian ini, data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini, yaitu : 1) Faktor penyebab seseorang melakukan tindakan main hakim sendiri karena adanya faktor emosional, faktor ikut-ikutan, kurang mempercayai aparat penegak hukum, faktor situasi. 2) Upaya penegak hukum dalam mengantisipasi/mencegah terjadi tindakan main hakim sendiri adalah para penegak hukum harus memberikan pemahaman mengenai hukum kepada masyarakat, memperbaiki sistem hukum pada saat ini dalam penerapannya, lembaga hukum dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus memperbaiki sistem kinerjanya 3) Penerapan hukum pada masyarakat yang main hakim sendiri dalam Islam itu sendiri sudah sangat jelas tercantum di dalam al-Qur'an Surah Al-Ma'idah/5:45 dan Hadits Rasulullah Saw "Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakr bin Abu Syaibah]; Telah menceritakan kepada kami [Hafsh bin Ghiyats] dari [Hisyam bin 'Urwah] dari [Bapaknya] dari [Hisyam bin Hakim bin Hizam] dia berkata; "Saya pernah melewati beberapa orang di Syam yang dijemur di terik matahari sedangkan kepala mereka dituangi minyak. Kemudian Hisyam bertanya; 'Mengapa mereka ini dihukum? Seseorang menjawab; 'Mereka disiksa karena masalah pajak.' Hisyam berkata; 'Sesungguhnya saya pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Sesungguhnya Allah akan menyiksa orang-orang yang menyiksa orang lain di dunia.

Implikasi dari penelitian ini, yaitu : 1) Perlu adanya peraturan yang tegas mengenai akibat hukum atas pelanggaran asas praduga tak bersalah, sehingga setiap penegak hukum tidak akan mengabaikan asas praduga tak bersalah selama proses peradilan. 2) Melakukannya peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga penegak hukum yang proporsional yang sesuai dengan kepastian hukum, adil dan benar. 3) Bagi tokoh agama dan juga tokoh masyarakat dapat memberikan pemahaman agama kepada masyarakat tentang larangan main hakim sendiri karena tindakan tersebut dosa.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala hak warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Suatu negara hukum menurut Sri Soemantri, harus memenuhi beberapa unsur, yaitu :<sup>1</sup>

1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
3. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara; dan
4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.

Berkaitan dengan pernyataan tersebut, khusus mengenai butir 2, adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), dapat diartikan bahwa dalam setiap konstitusi selalu ditemukan adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (warga negara).

Pengaturan dan penegakan HAM di dalam negara hukum mutlak diperlukan khususnya di Indonesia. Selain itu, menurut Soerjono Soekanto perlu pula ditingkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat sehingga masing-masing

---

<sup>1</sup>Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung : Alumni, 1992), h.29.

anggotanya menghayati hak dan kewajibannya, serta secara tidak langsung meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum sesuai UUD 1945.<sup>2</sup>

Penegakan hukum dan pelaksanaan hukum di Indonesia masih jauh dari sempurna. Kelemahan utama bukan pada sistem hukum dan produk hukum, tetapi pada penegakan hukum. Harapan masyarakat untuk memperoleh jaminan dan kepastian hukum masih sangat terbatas. Penegakan dan pelaksanaan hukum belum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran.<sup>3</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, selama diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang merupakan aturan dalam proses peradilan pidana atau proses penegakan hukum pidana, ternyata masih banyak terjadi kekurangan-kekurangan. Undang-Undang tersebut dirasakan belum dapat mengakomodasikan harapan para pencari keadilan, terutama mengenai penerapan hukum pada masyarakat yang main hakim sendiri merupakan hal yang penting dalam proses peradilan pidana. Hukum mempunyai peranan penting di dalam kehidupan masyarakat, salah satunya agar terciptanya ketertiban. Pengertian hukum itu sendiri menurut E. Utrecht adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.<sup>4</sup> Hukum selalu melekat dalam kehidupan manusia. Maka dari itu untuk membicarakan hukum kita tidak dapat lepas membicarakannya dari kehidupan manusia. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan

---

<sup>2</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986) h.1.

<sup>3</sup>Erman Rajagukguk, *Perlu Pembaharuan Hukum dan Profesi Hukum*, (Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Hukum, Suara Pembaharuan), h.11.

<sup>4</sup>R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), h. 35.



undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta pengakuan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu demokratis.

Dewasa ini banyak terjadi tindak kekerasan dalam masyarakat. Tindak kekerasan ada yang dilakukan oleh individu ada yang secara bersama-sama atau oleh massa. Defenisi main hakim sendiri masih sulit ditemukan, tidak ada kesatuan pendapat tentang pengertian dari pada perbuatan main hakim sendiri tersebut. Salah satu bentuk tindakan main hakim sendiri (*Eigenrechting*) adalah pemukulan atau pengeroyokan, ini sering terjadi akibat emosi massa yang tidak bisa dikontrol. Ada kecenderungan massa melakukan tindakan di luar dari hal yang sewajarnya, menghakimi sendiri bukanlah cara yang tepat melainkan merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia dan telah memberikan kontribusi negative terhadap proses penegakan hukum. Penegakan hukum dalam kasus main hakim sendiri ini perlu diupayakan secara serius dan penanganan yang sungguh-sungguh, tindakan main hakim sendiri akan menjadi budaya dalam masyarakat dan menjadi noda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bila suatu Negara dalam kehidupan masyarakatnya lebih dominan berlaku hukum rimba ketimbang hukum normative yang legal formal maka masyarakat tersebut akan cenderung tunduk kepada kelompok-kelompok atau perorangan yang mempunyai kekuatan fisik, seperti kelompok tertentu yang mempunyai basis massa yang kuat atau kelompok premanisme yang menunjukkan bahwa kelompok masyarakat kita cenderung menyiapkan kekuatan fisik sebagai langkah antisipasi dalam menyelesaikan setiap masalahnya ketimbang menggunakan jalur hukum yang mereka nilai tidak efektif.

Munculnya tindakan main hakim sendiri, seiring dengan perkembangan masyarakat yang merasa mempunyai kekuasaan dan menggunakan kekuasaan yang dimilikinya. Tindakan main hakim sendiri hamper menyentuh seluruh di daerah Indonesia, baik itu kota besar, kota kecil, kabupaten, maupun dusun dan desa-desa. Main hakim sendiri bukanlah cara yang tepat melainkan suatu pelanggaran hak asasi manusia dan telah memberikan kontribusi negative terhadap proses penegakan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menjelaskan dengan tegas bahwa Negara hukum (*rechstaat*) dan hukum Negara kekuasaan (*manchstaat*) sehingga ada beberapa konsekuensi yang melekat padanya. Hukum merupakan kumpulan peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi Negara, dan memuat sanksi yang tegas atas peraturan tersebut.<sup>5</sup>

Main hakim sendiri merupakan terjemahan dari istilah Belanda "*Eigenrechting*" yang berarti cara main hakim sendiri, mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, tanpa pengetahuan pemerintah dan tanpa penggunaan alat kekuasaan pemerintah. Selain itu main hakim sendiri adalah istilah dari tindakan untuk menghukum suatu pihak tanpa melewati proses yang sesuai dengan hukum. Main hakim sendiri merupakan jenis konflik kekerasan yang cukup dominan di Indonesia, bentuknya biasanya penganiayaan, perusakan, dan sebagainya. Yang menjadi tersangka di dalam tindakan main hakim sendiri ialah sekelompok orang.

Dalam ajaran Islam main hakim sendiri disebut *jinayah*, dapat dilihat dari unsur-unsur perbuatannya sehingga menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal, atau harta benda.<sup>6</sup> Hukuman yang dikenakan kepada pelaku main

---

<sup>5</sup>Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), h. 3.

<sup>6</sup>Yusuf Imaning, *Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam*, (Palembang : Rafah Press, 2009), h. 1.

hakim sendiri tanpa ada pembeda secara *syara'* adalah hukuman *qhisas*. Hukuman dalam ajaran Islam memiliki tujuan untuk menjadi pelajaran bagi orang lain agar tidak meniru melakukan tindakan melanggar hukum setelah melihat bentuk dari hukuman yang ditujukan agar yang telah terbukti melakukan pelanggaran menjadi jera dan mau menjadi baik setelah adanya hukuman yang dijalani.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, hukuman hanya dapat diberlakukan bagi orang yang telah terbukti bersalah dan keputusan tersebut ditetapkan oleh hakim melalui proses pembuktian terlebih dahulu. Sebelum proses memberikan kejelasan status orang yang dituduh melakukan pelanggaran, maka tetap berlaku prinsip praduga tak bersalah. Hal ini juga tetap berlaku pada pelaku yang telah terbukti tertangkap tangan melakukan suatu tindak pidana.<sup>7</sup>

Sedangkan di dalam KUHP juga melarang masyarakat untuk melakukan tindakan main hakim sendiri karena tidak sesuai dengan UUD 1945, yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum artinya segala hal yang di Indonesia diatur dengan hukum termasuk tindakan main hakim sendiri. Tindakan main hakim sendiri di sini merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia (HAM).<sup>8</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur secara khusus mengenai main hakim sendiri, akan tetapi, bukan berarti KUHP tidak dapat diterapkan sama sekali jika terjadi perbuatan main hakim sendiri. Dalam hal terjadinya tindakan main hakim sendiri, bagi korban tindakan tersebut dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib dengan alasan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dalam pasal tersebut tidak disebutkan bahwa

---

<sup>7</sup>Topo Santoso, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Gem Insani), h. 11.

<sup>8</sup>Barda Narwawi Arief, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group), h. 57.

“penganiayaan” merupakan tindakan main hakim sendiri. Namun, jika kita membaca unsur-unsur dalam pasal tersebut, maka penganiayaan dapat dikategorikan tindakan main hakim sendiri.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dipandang penting oleh penulis untuk melakukan penelitian dan penelaan secara mendalam tentang : ***“Perbuatan Main Hakim Sendiri (Eigenrechting) Pada Masyarakat Kecamatan Parigi Desa Manimbahoi Dusun Pattiro Kabupaten Gowa (Perspektif Hukum Islam)”***.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian skripsi ini, adalah:

1. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya main hakim sendiri pada masyarakat?
2. Bagaimana upaya penegak hukum dalam mengantisipasi/mencegah terjadinya main hakim sendiri?
3. Bagaimana penerapan hukum pada masyarakat yang main hakim sendiri dalam perspektif hukum Islam?

## **C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

Agar jelas ruang lingkup yang akan diteliti dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang diuraikan, maka akan dipaparkan mengenai batasan-batasan yang menjadi fokus penelitian, dan deskripsi fokus ini:

### **1. Fokus Penelitian**

- a. Main Hakim Sendiri
- b. Main Hakim Sendiri Dalam Perspektif Hukum Islam
- c. Masyarakat

## 2. Deskripsi Fokus

### a. Main Hakim Sendiri

Menurut kamus besar bahasa Indonesia main hakim sendiri atas istilah hukumnya *Eigenrechting* adalah menghakimi orang lain tanpa memperdulikan hukum yang ada biasanya dilakukan dengan pemukulan, penyiksaan, pembakaran dan lain sebagainya. *Eigenrechting* dalam ilmu hukum merupakan tindakan main hakim sendiri atau aksi sepihak. Tindakan ini yaitu seperti memukul orang yang telah menipu kita, ataupun tindakan menangkap orang yang tidak mau melunasi hutangnya kepada kita. Tindakan main hakim sendiri seperti ini merupakan sebuah tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri dengan sewenang-wenang tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan. Sebagai sebuah Negara dengan doktrin Negara hukum seperti yang termaktub dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 bahwa “Indonesia adalah Negara hukum”. Tentu tindakan main hakim sendiri tidak memiliki satupun alasan pembenaran dari sisi normative.

### b. Main Hakim Sendiri Dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum pidana Islam istilah tindak pidana biasa seperti main hakim sendiri disebut dengan kata *jarimah*, yang berarti tindak pidana. Kata lain yang sering digunakan untuk pidana istilah *jarimah* ialah *jinayah*. Hanya di kalangan fuqaha istilah *jarimah* pada umumnya digunakan untuk semua pelanggaran terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik mengenai jiwa ataupun lainnya. Sedangkan *jinayah* pada umumnya digunakan untuk menyebut perbuatan pelanggaran mengenai jiwa atau anggota badan, seperti membunuh dan melukai anggota badan tertentu.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Yusuf Imaning, *Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam*, (Palembang : Rafah Press, 2009), h. 26.



Main hakim sendiri adalah suatu tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang terhadap seseorang lainnya, di dalam hukum Islam secara eksplisit telah dijelaskan oleh Allah Swt dalam firman-Nya Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah/5:45 sebagai berikut :

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ  
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ  
بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ  
الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Terjemahan :

“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.”<sup>10</sup>

### c. Masyarakat

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah *society* yang berasal dari kata Latin *socius* yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab *syaraka* yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi. Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan

<sup>10</sup> Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Cet. X; Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), h. 115.

hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu: 1) Interaksi antar warga-warganya, 2). Adat istiadat, 3) Kontinuitas waktu, 4) Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga.

#### **D. *Kajian Pustaka***

Dalam penelitian ini peneliti ingin meneliti tentang perbuatan main hakim hakim sendiri pada masyarakat kecamatan parigi desa manimbahoi dusun pattiro kabupaten gowa, dengan fokus penelitian: apa faktor yang menyebabkan terjadinya main hakim sendiri pada masyarakat, bagaimana upaya penegak hukum dalam mengantisipasi atau mencegah terjadinya main hakim sendiri, dan bagaimana penerapan hukum pada masyarakat yang main hakim sendiri dalam perspektif hukum Islam. Peneliti pun menggunakan beberapa referensi yang berkaitan dengan pembahasan, yang dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Novi Rahmawati, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia meneliti tentang “Analisis Hukum Tentang Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrechting) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana ketentuan hukum tentang tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap pelaku tindak pidana korban tindakan main hakim sendiri. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah secara yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan dengan norma-norma hukum yang merupakan patokan untuk

bertingkah laku atau melakukan perbuatan yang pantas ditunjang dengan alat pengumpul data berupa observasi dalam bentuk catatan lapangan atau catatan berkala.

2. Abdul Rafik Kabianto, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar meneliti tentang “Sanksi Pidana Main Hakim Sendiri (Eigenrechting) Tinjauan Kriminologis dan Yuridis Terhadap Kasus-Kasus di Pengadilan Negeri Sungguminasa”. Penelitian ini membahas tentang pelaku tindakan main hakim sendiri “pengeroyokan”. Serta menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya pengeroyokan terhadap pelaku tindakan main hakim sendiri berhubung karena judul dari pembahasan dalam skripsi ini ialah tindak pidana main hakim sendiri “Eigenrechting” tinjauan kriminologis dan yuridis terhadap kasus-kasus di Pengadilan Negeri Sungguminasa.
3. Riva Cahya Limba, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung meneliti tentang “ Peranan Penyidik Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri (Eigenrechting) (Studi Pada Polresta Bandar Lampung)”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana peranan penyidik dalam melaksanakan perannya terhadap perbuatan main hakim sendiri.
4. Febry Nur Naim, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar meneliti tentang “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrechting) Yang Menyebabkan Pada Kematian (Studi Kasus Di Kota Makassar 2011 s/d 2014)”. Penelitian ini membahas tentang faktor penyebab tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana dan penanggulangan tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana.
5. Aima, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri

Raden Fatah Palembang meneliti tentang “Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Pencurian Yang Mengakibatkan Kematian Perspektif Hukum Islam Dan KUHP”. Penelitian ini membahas tentang sanksi tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian yang mengakibatkan kematian dalam hukum Islam, dan sanksi tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian yang mengakibatkan kematian dalam KUHP.

6. Chandro Panjaitan dan Firman Wijaya dalam Jurnal Hukum Adigama meneliti tentang “Penyebab Terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri Atau *Eigenrichting* Yang Mengakibatkan Kematian (Contoh Kasus Pembakaran Pelaku Pencurian Motor Dengan Kekerasan Di Pondok Aren Tangeang)”. Penelitian ini membahas tentang faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan main hakim sendiri dan juga pencegahan yang harus dilakukan untuk menghindari terjadinya tindakan main hakim sendiri.
7. Taufiqurrohman, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya meneliti tentang “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Main Hakim Sendiri oleh Massa pada Pelaku Pencurian Sepeda Motor”. Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan perilaku main hakim sendiri oleh massa terhadap pelaku pidana pencurian sepeda motor, dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap perilaku tersebut.
8. Fitriani, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa meneliti tentang “Perbuatan Main Hakim Sendiri Dalam Kajian Kriminologis Dan Sosiologis”. Penelitian ini membahas tentang faktor penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri secara kriminologis dan sosiologis.
9. Dr. Hamzah Hasan, M.H.I dalam bukunya Hukum Pidana Islam 1

membahas tentang jinayah dan jarimah, unsur-unsur jarimah, sumber-sumber hukum pidana Islam, asas-asas hukum pidana Islam, tindak pidana hudud, tindak pidana qishas, tindak pidana takzir, bentuk-bentuk tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan hukuman dalam hukum pidana Islam.

10. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah penerapan hukum pada masyarakat yang main hakim sendiri dalam perspektif hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui bagaimanakah upaya penegak hukum dalam mengantisipasi/mencegah terjadinya main hakim sendiri.
- c. Untuk mengetahui apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya main hakim sendiri pada masyarakat.

##### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah dan dapat dijadikan bahan referensi baik oleh mahasiswa maupun pelajar dalam hal penulisan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan skripsi ini.
- b. Diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti dalam penerapan hukum di Indonesia terhadap tindakan main hakim sendiri.



## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### A. *Tindak Pidana*

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

*Strafbaar feit* merupakan istilah asli Bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan berbagai arti di antaranya, yaitu: tindak pidana, delik perbuatan pidana, peristiwa pidana, maupun perbuatan yang dapat dipidana. Dalam praktek, para ahli di dalam memberikan definisi *staftbaar feit* atau tindak pidana berbeda-beda sehingga perkataan tindak pidana mempunyai banyak arti. Tindak pidana menurut Simons didefinisikan sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>11</sup> Rumusan tindak pidana yang dirumuskan Simons tersebut dipandang oleh Jonkers dan Utrecht sebagai rumusan yang lengkap, karena meliputi:<sup>12</sup>

- a. Dengan pidana oleh hukum;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*);
- d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Van Hamel juga sependapat dengan rumusan tindak pidana dari Simons, tetapi menambahkan adanya “sifat perbuatan yang dapat dihukum”. Jadi, pengertian tindak pidana menurut Van Hamel akan meliputi lima unsur, sebagai

---

<sup>11</sup>E.Y. Kanter, S.H., 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta : Alumni AHM-PTHM), h. 205.

<sup>12</sup>Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika), h. 97.

berikut:<sup>13</sup>

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*);
- d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya;
- e. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum.

Vos merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana. Jadi, suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian tindak pidana yang dirumuskan oleh Vos, apabila dibandingkan dengan rumusan tindak pidana dari Simons maupun Van Hamel, maka rumusan Vos tersebut tidak ada sifat-sifat tindak pidana yang lain seperti: sifat melawan hukum, dilakukan orang dengan kesalahan, dan orang itu mampu mempertanggungjawabkan. Rumusan Vos seperti itu sama saja memberi keterangan “*een vierkante tafel is vier kant*” (meja segi itu adalah empat), karena defenisinya tidak menjepit isinya, sedangkan pengertian “orang lain” dan “kesalahan” juga tidak disinggung, karena apa yang dimaksud *strafbaar feit* sebagai berikut:

- a. Pelarangan atau pemerkosaan kepentingan hukum (*schending of kreenking van een rechtsbelang*);
- b. Suatu yang membahayakan kepentingan hukum (*het in gavearbrenge van een rechtsbelang*).

Sathochid Kartanegara menjelaskan bahwa kepentingan hukum yang dimaksud adalah tiap-tiap kepentingan yang harus dijaga agar tidak dilanggar,

---

<sup>13</sup> Sathochid Kartanegara, 1998, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, (Jakarta : Balai Lektur Mahasiswa), h. 75.

yaitu terdiri atas tiga jenis, yaitu:

- a. Kepentingan perseorangan, yang meliputi jiwa (*levenen*), badan (*lijk*), kehormatan (*eer*) dan harta benda (*vermogen*);
- b. Kepentingan masyarakat, yang meliputi : ketentraman dan keamanan (*rusten order*); dan
- c. Kepentingan Negara adalah keamanan Negara.

Moeljatno menerjemahkan istilah *strafbaar feit* sebagai “perbuatan pidana” dan menyimpulkan rumusan tindak pidana dari Simons dan Van Hamel mengandung dua pengertian sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. Bahwa *feit* adalah *strafbaar feit* berarti *handeling*, kelakuan, atau tingkah laku;
- b. Bahwa pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.

Pengertian tersebut pada butir 1 di atas berbeda dengan pengertian “perbuatan” dalam perbuatan pidana. Perbuatan adalah kelakuan ditambah kejadian atau akibat yang ditimbulkan oleh kelakuan, dan bukan kelakuan saja. Sehingga beliau berkata bahwa *strafbaar feit* itu sendir atas *handeling* (kelakuan) dan *gevelod* (akibat). Sedangkan pengertian pada butir 2 (dua) jug berbeda dengan “perbuatan pidana”, karena di sini tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana apabila dilanggar, atau perbuatan pidana dipisahkan dengan kesalahan. Hal ini berbeda dengan *strafbaar feit* bahwa satu mencakup dua hal, yaitu perbuatan pidana dan kesalahan.

Bertolak dari pendapat para ahli tersebut di atas, maka dapat disimpulkan

---

<sup>14</sup>Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta), h. 56.

apa yang dimaksud dengan tindak pidana atau *stafbaar feit*, yaitu suatu rumusan yang memuat unsur-unsur tertentu yang menimbulkan dapat dipidananya seseorang atas perbuatannya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan pidana. Unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat berupa perbuatan yang sifatnya aktif maupun perbuatan yang sifatnya pasif atau tidak berbuat sebagaimana yang diharuskan oleh undang-undang, yang dilakukan seseorang dengan kesalahan, bertentangan dengan hukum pidana, dan orang itu dapat dipertanggungjawabkan karena perbuatannya. Di samping itu, perlu diperhatikan pula mengenai waktu dan tempat terjadinya suatu tindak pidana sebagai syarat mutlak yang harus diperhatikan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya, rasionya untuk kepastian hukum bagi pencari keadilan, dan tidak tercantumnya waktu dan tempat terjadinya tindak pidana maka surat dakwaan yang dibuat penuntut umum dapat batal demi hukum.

## **2. Unsur-unsur Tindak Pidana**

Dasar utama di dalam hukum pidana adalah adanya suatu tindak pidana yang memberikan sesuatu pengertian kepada kita tentang sesuatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang, di mana terhadap pelanggarannya dapat dijatuhi pidana. Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana, apabila perbuatan itu telah memenuhi atau semua unsur yang dirumuskan sebagai tindak pidana. Apabila salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi, maka proses penuntutan yang dimajukan oleh penuntut umum kepada hakim agar diadili tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, apabila perbuatan itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan di dalam pasal-pasal undang-undang pidana.

Bila mana suatu perbuatan dapat disebut sebagai suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi 5 (lima) unsur, sebagaimana berikut:<sup>15</sup>

- a. Harus ada suatu kelakuan (*gedraginf*);
- b. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wetterlijke omschrijving*);
- c. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak (melawan hukum);
- d. Kelakuan itu dapat diberatkan (dipertanggungjawabkan) kepada pelaku;
- e. Kelakuan itu diancam dengan pidana.

Untuk mendapatkan gambaran mengenai kelima unsur tersebut diatas, sehingga suatu kelakuan atau perbuatan seseorang itu dapat disebut sebagai tindak pidana, berikut ini dikutipkan rumus tindak pidana yang dapat dijabarkan Pasal 362 KUHP, yang menyatakan sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan dimaksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.<sup>16</sup>

Unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan di dalam Pasal 362 KUHP, sebagai berikut:

- a. Barang siapa;
- b. Mengambil;
- c. Suatu barang;
- d. Sebagian atau keseluruhan kepunyaan orang lain;
- e. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Bilamana perbuatan seseorang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan di dalam Pasal 362 KUHP tersebut di atas, maka orang itu dapat

---

<sup>15</sup>C.S.T. Kancil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka), h. 290.

<sup>16</sup>Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pencurian, Pasal 362.

dimintai pertanggungjawaban pidana karena pencurian. Tetapi, apabila orang itu hanya mengambil sesuatu barang milik orang tetapi bermaksud untuk dipindahkan tempatnya, maka ia tidak dapat dianggap telah melakukan tindak pidana. Artinya, apabila salah satu unsur tindak pidana tersebut tidak terpenuhi maka akan mempunyai arti dan maksud yang berbeda.

### 3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Sebelum dibicarakan mengenai jenis-jenis delik atau tindak pidana, sekedar mengingatkan kembali bahwa tujuan diadakannya hukum pidana adalah melindungi dan menghindari gangguan atau ancaman bahaya terhadap kepentingan hukum, baik kepentingan perseorangan, kepentingan masyarakat dan kepentingan Negara. Tiap-tiap perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana yang dinyatakan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan dapat memberikan gambaran kepentingan hukum yang dilanggar. Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik dapat digolongkan menjadi berbagai jenis delik atau tindak pidana.

Dalam hukum pidana mengenal berbagai jenis delik yang dapat dibedakan menurut pembagian delik tertentu, yaitu:

#### a. Delik Kejahatan (*Misdrijven*) dan Delik Pelanggaran (*Overtradingen*)

Delik kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang dipandang seharusnya dipidana karena bertentangan dengan keadilan, meskipun perbuatan itu belum diatur dalam undang-undang. Delik kejahatan ini sering disebut *mala per se* atau delik hukum, artinya perbuatan itu sudah dianggap sebagai kejahatan meskipun belum dirumuskan dalam undang-undang karena merupakan perbuatan tercela dan merugikan masyarakat atau bertentangan dengan keadilan. Delik pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan itu barulah diketahui sebagai delik setelah dirumuskan dalam

undang-undang. Delik pelanggaran ini sering disebut sebagai *mala quia prohibita* atau delik setelah dirumuskan dalam undang-undang.

b. Delik Formil (*Formeel Delict*) dan Delik Materil (*Materieel Delict*)

Delik formil (*Formeel delict*) adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dikemukakan dan perbuatan itu mencocoki rumusan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan. Delik formil ini masyarakat suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan selesai dilakukan tanpa menyebut akibatnya. Atau dengan perkataan lain yang dilarang undang-undang perbuatannya. Delik materiil (*materieel delict*) dilarang yang ditimbulkan dari suatu perbuatan tertentu, dan perbuatan yang dilakukan bukan menjadi soal. yang dilarang adalah timbulnya akibat yang berarti akibat yang ditimbulkan itu merupakan unsur delik. atau dengan perkataan lain yang dilarang dalam delik materiil adalah akibatnya.

c. Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan Delik Kealpaan (*Culpa*)

Delik *dolus* adalah suatu delik yang dilakukan karena kesengajaan Delik *culpa* adalah suatu delik yang dilakukan karena kelalaian atau kealpaan.

d. Delik Aduan (*Klacht Delicten*) dan Delik Umum (*Gawone Delicten*)

Delik aduan (*klacht delicten*) adalah suatu delik yang dapat dituntut dengan membutuhkan atau mengisyaratkan adanya pengaduan dari orang yang dirugikan, artinya apabila tidak ada pengaduan maka delik itu tidak dapat dituntut. Delik aduan ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :

1. Delik aduan absolute (*absolute klachtdelict*) adalah delik mutlak membutuhkan pengaduan dari orang dirugikan untuk penuntutan.
2. Delik aduan relatif (*relative klachtdelict*) adalah delik yang sebenarnya bukan delik aduan tetapi merupakan delik laporan sehingga menjadi delik aduan yang umumnya terjadi di lingkungan keluarga atau antara



orang yang merugikan dan orang yang harus dirugikan terdapat hubungan yang bersifat khusus.

3. Delik umum (*gewone delicten*) adalah suatu delik yang dapat dituntut membutuhkan adanya pengaduan.

e. Delik Umum (*Delicta Communia*) dan Delik Khusus (*Delicta Propria*)

Delik umum (*delicta communia*) adalah suatu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Delik umum ini sering disebut *gamene delicten* atau *algamene delicten*. Delik khusus (*delicten propria*) adalah suatu delik yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas atau sifat-sifat tertentu, pegawai negeri atau anggota militer.

f. Delik *Commisionis*, *Ommisionis* dan *Per Ommisionis Commissa*

Delik *Commisionis* adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Apabila perbuatan yang dilarang itu dilanggar dengan perbuatan secara aktif berarti melakukan delik *commisionis*. Delik *Ommisionis* adalah suatu perbuatan yang diharuskan oleh undang-undang. Apabila perbuatan yang diharuskan atau diperintahkan itu dilanggar dengan tidak berbuat berarti melakukan delik *ommisionis*. Delik *commisionis per ommisionem commisa* adalah delik yang dapat diwujudkan baik berbuat sesuatu ataupun tidak berbuat sesuatu ataupun tidak berbuat sesuatu.

g. Delik Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut

Delik berdiri sendiri adalah delik yang hanya dilakukan sekali perbuatan saja, artinya perbuatan yang terlarang dan diancam pidana oleh undang-undang telah selesai dilakukan atau telah selesai menimbulkan suatu akibat. Delik berlanjut adalah delik yang meliputi beberapa perbuatan di mana perbuatan satu dengan lainnya saling berhubungan erat dan berlangsung terus menerus.

#### h. Delik Politik Murni dan Delik Politik Campuran

Menurut konferensi hukum pidana di Koppenhagen 1939 yang dimaksud dengan delik politik adalah suatu kejahatan yang menyerang baik organisasi, maupun fungsi-fungsi Negara dan juga hak-hak warga negara yang bersumber dari situ.<sup>20</sup> Dalam KUHP delik-delik yang dikualifikasikan sebagai delik politik dapat ditemukan dalam pasal-pasal Bab I Buku II. Di samping itu delik-delik politik juga diatur dalam peraturan perundangundangan diluar KUHP, misalnya undang-undang terorisme. Menurut sifat dan tujuan dari delik yang dilakukan pada umumnya delik politik dibedakan menjadi dua jenis, sebagai berikut :

1. Delik politik murni adalah delik-delik yang ditujukan kepentingan politik.
2. Delik politik campuran adalah delik-delik yang mempunyai sifat setengah politik dan setengah umum. Dengan perkataan lain bahwa delik itu merupakan tujuan politik, atau sebaliknya.

#### i. Delik Biasa dan Delik Berkualifikasi

Delik biasa (*eenvoudige delicten*) adalah semua delik yang berbentuk pokok atau sederhana tanpa dengan pemberatan ancaman pidananya. Delik berkualifikasi adalah delik yang berbentuk khusus karena adanya keadaan-keadaan tertentu yang dapat memperberatkan atau mengurangi ancaman pidananya.

### **B. Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*)**

Tindakan main hakim sendiri, aksi sepihak atau "*eigenrechting*" merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan. Pada hakikatnya tindakan main hakim sendiri ini merupakan pelaksanaan sanksi

perorangan.<sup>17</sup>

Main hakim sendiri atau yang biasa diistilahkan pada masyarakat luas dan media massa dengan peradilan massa, penghakiman massa, pengadilan jalanan, pengadilan rakyat, amuk massa. Anarkisme massa atau juga brutalisme massa, merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu "*Eigenrechting*" yang berarti cara main hakim sendiri, mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, tanpa sepengetahuan pemerintah dan tanpa penggunaan alat kekuasaan pemerintah. Perbuatan main hakim sendiri hampir selalu berjalan sejajar dengan pelanggaran hak-hak orang lain. Dan oleh karena itu tidak diperbolehkan perbuatan ini menunjukkan bahwa adanya indikasi rendahnya kesadaran terhadap hukum.<sup>18</sup> Menurut Firganefi main hakim sendiri adalah tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang, yang melanggar aturan hukum tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku.

Pada hakekatnya tindakan main hakim sendiri merupakan pelaksanaan sanksi/kelompok. Hanya saja sanksi yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok sulit diukur berat ringannya, karena massa terkadang dapat bertindak kalap dan tidak terkendali.<sup>19</sup> Perbuatan main hakim sendiri merupakan salah satu ancaman serius terhadap sistem hukum yang harus segera ditangani. Karena apabila tidak segera ditangani, perbuatan main hakim sendiri dapat merusak peradaban public dan tentunya tatanan hukum. Hukum sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia, sedangkan perbuatan main hakim sendiri dapat disebut perbuatan yang melanggar hak asasi manusia.

---

<sup>17</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 2003), h. 22.

<sup>18</sup>Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia), h. 167.

<sup>19</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 2003), h. 23.

Kasus main hakim sendiri (*Eigenrechting*) merupakan salah satu bentuk reaksi masyarakat karena adanya pelanggaran norma yang berlaku di masyarakat. Reaksi masyarakat, ditinjau dari sudut sosiologis, dapat dibedakan menjadi dua aspek, yaitu aspek positif dan aspek negatif.<sup>20</sup>

#### 1. Aspek positif

- a. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan melalui pendekatan-pendekatan kemasyarakatan sesuai dengan latar belakang terjadinya suatu tindak kejahatan.
- b. Reaksi masyarakat didasarkan atas kerja sama dengan aparat keamanan atau penegak hukum secara resmi.
- c. Tujuan penghukuman adalah pembinaan dan penyadaran atas pelaku kejahatan.
- d. Mempertimbangkan dan memperhitungkan sebab-sebab dilakukannya suatu tindak kejahatan.

#### 2. Aspek negatif

- a. Reaksi masyarakat adalah sertamerta, yaitu dilakukan dengan luapan emosional.
- b. Reaksi masyarakat didasarkan atas ketentuan lokal yang berlaku didalam masyarakat yang bersangkutan (takresmi).
- c. Tujuan penghukuman cenderung lebih bersifat pembalasan, penderaan, paksaan, dan pelampiasan dendam.
- d. Relative lebih sedikit mempertimbangkan dan memperhitungkan latar belakang mengapa dilakukan suatu tindakan kejahatan.

Tindakan main hakim sendiri merupakan suatu respon masyarakat yang malah menciptakan suasana tidak tertib. Masyarakat yang harusnya menaati

---

<sup>20</sup>Abdul Syahni, 1987, *Sosiologi Kriminalitas*, (Bandung : Rejama Karya), h. 100-101.

hukum yang berlaku yang telah ditetapkan oleh penguasa bertindak sebaliknya, mereka melakukan suatu respon terhadap adanya kejahatan dengan menghakimi sendiri pelaku tindak pidana. Akan tetapi apabila dilihat dari pengertian tindak pidana yang telah diuraikan di muka maka akan tampak jelas bahwa apa yang tertangkap oleh masyarakat terhadap pelaku tindak pidana yang tertangkap oleh masyarakat dengan dipukuli sampai babak belur bahkan sampai dengan membakarnya hidup-hidup merupakan suatu bentuk lain dari kejahatan.

Main hakim sendiri sama halnya dengan kerumunan yang berlawanan dengan norma-norma hukum (*lawless erowds*). Menurut Soerjono Soekanto kerumunan yang berlawanan dengan norma-norma hukum (*lawless erowds*) terbagi dua, yaitu :<sup>21</sup>

1. Kerumunan yang bertindak emosional (*acting mobs*), kerumunan semacam ini bertujuan untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan kekuatan fisik yang berlawanan dengan norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Pada umumnya, kumpulan orang-orang tersebut bergerak karena meresahkan bahwa hak-hak mereka diinjak-injak atau tidak adanya keadilan.
2. Kerumunan yang bersifat immoral (*immoral crowds*), contohnya adalah seperti orang-orang yang mabuk.

Di Negara Indonesia belum ada regulasi yang mengatur secara khusus tentang perbuatan main hakim sendiri. Namun regulasi tersebut dapat ditemukan di beberapa undang-undang, berikut ini regulasi-regulasi untuk mengatur perbuatan main hakim sendiri:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

---

<sup>21</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1990), h. 161.

## Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

### a. Hal-Hal Yang Menghapuskan, Mengurangi, atau Memberatkan Pidana

#### 1) Pasal 48 KUHP

Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.

#### 2) Pasal 49 KUHP

(a) Tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.

(b) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

### b. Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum

#### 1. Pasal 170 KUHP

Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

#### 2. Tersalah dihukum :

a. Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia denggan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka.

b. Dengan penjara selama-lamanya Sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh.

c. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu

menyebabkan matinya orang.

c. Meninggalkan Orang Yang Perlu Ditolong

1. Pasal 304 KUHP

Barangsiapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

2. Pasal 306 KUHP

(a) Jika salah satu perbuatan berdasarkan pasal 304 mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun enam bulan.

(b) Jika mengakibatkan kematian pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

d. Penghinaan

1. Pasal 310 ayat (1)

Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.

e. Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang

1. Pasal 333

(a) Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau perampasan kemerdekaan yang demikian,

(b) Mengakibatkan luka-luka berat,

(c) Mengakibatkan kematian,



f. Penganiayaan

Dalam pasal tersebut sering digunakan untuk menjerat para pelaku perbuatan main hakim sendiri karena pelaku biasanya melakukan penganiayaan terhadap korban dengan tujuan agar korban mendapatkan efek jera.

1. Pasal 354

(a) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat,

(b) Mengakibatkan kematian,

2. Pasal 358

Mereka yang turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya,

g. Menghancurkan atau Merusakkan Barang

1. Pasal 406

Barangsiapa dengan sengaja melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,

2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

KUHAP dalam kaitannya dengan perbuatan main hakim sendiri mengatur mengenai hukum acara yang digunakan para aparat penegak hukum untuk melaksanakan tugasnya memeriksa perkara main hakim sendiri dari proses penyelidikan oleh pihak kepolisian hingga dibacakannya putusan oleh hakim dan pelaksanaan putusan yang dilaksanakan oleh kejaksaan.

3. Undang-Undang Lain

a. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam

Pasal 4 yang berbunyi :<sup>22</sup>

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan diadapan hukum, dan hak-hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

- b. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 33 ayat (1) yang berbunyi :<sup>23</sup>

“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiannya”.

Pada realitasnya, pasal yang biasa digunakan para penegak hukum untuk menjerat pelaku main hakim sendiri hanyalah beberapa pasal saja seperti: Apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan perbuatan main hakim sendiri maka pada umumnya dapat dijerat dengan pasal 170 KUHP, Pasal 351, dan Pasal 406 KUHP tentang perusakan yang mengakibatkan barang rusak, hancur sehingga tidak dapat dipakai lagi atau hilang dengan melawan hukum. Berdasarkan pasal 4 dan pasal 33 ayat (1) di mana apabila kedua pasal tersebut disimpulkan bahwa perbuatan main hakim sendiri merupakan suatu tindakan yang bersifat melawan hukum dan melanggar hak asasi manusia.

Dari beberapa undang-undang dan pasal-pasal diatas sebenarnya masih banyak pasal yang dapat digunakan untuk menjerat para pelaku perbuatan main hakim sendiri, namu realitasnya tidak banyak pasal yang diterapkan para penegak

---

<sup>22</sup>Lihat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 4.

<sup>23</sup>Lihat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 33 ayat (1).

hukum untuk menjerat para pelaku perbuatan main hakim sendiri. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor-faktor yaitu:

Pertama, minimnya kemampuan penegak hukum dalam memahami bunyi pasal yang ada dalam KUHP atau undang-undang pidana lainnya. Kedua, yurisprudensi dijadikan sebagai pedoman bagi para penegak hukum khususnya hakim dalam menyelesaikan perkara dalam kasus perbuatan main hakim sendiri. Ketiga, penerapan pasal yang ada di dalam undang-undang perlu disesuaikan dengan bentuk perbuatan main hakim sendiri yang dapat berupa penganiayaan, perusakan harta benda dan sebagainya.

### ***C. Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrhting) dalam Perspektif Hukum Islam***

Memperoleh keadilan adalah hak asasi bagi setiap manusia, termaksud kepada pelaku tindak pidana. Hukum ialah keadilan yang dapat mewujudkan ketenteraman, kebahagiaan dan ketenangan secara wajar bagi masyarakat maupun pelaku kejahatan.<sup>24</sup> Pelaku kejahatan tidak seharusnya mendapatkan perlakuan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat, karena di Indonesia telah dibentuk instansi khusus untuk menangani pelaku tindak pidana seperti kepolisian, pengadilan, dan lembaga yang berwenang, karenanya setiap tindak pidana maka seyogianya dilaporkan kepada pihak yang berwenang, agar tidak terjadi kesewenang-wenangan bahkan ketidakadilan oleh masyarakat dengan mengambil jalan pintas terhadap pelaku tindak pidana dengan main hakim sendiri.

Islam pun menghendaki kepada manusia agar tetap memegang teguh prinsip-prinsip keadilan termasuk dalam persoalan sosial dimasyarakat. Pembuktian akan hal itu dapat dicermati dengan firman Allah Swt yang termaktub

---

<sup>24</sup><http://www.muhammadiyah.or.id/9-content-190-det-tafsir-alquran.html> (di akses tgl 13 januari 2016).

di dalam Al-Qur'an Surah al-Nisa/4:135 yang berbunyi

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ  
أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا  
تَتَّبِعُوا أَهْوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوُّرًا أَوْ تَعْرِضًا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ  
خَبِيرًا﴾

Terjemahan :

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Teliti terhadap segala yang kamu kerjakan”.<sup>25</sup>

Sebab Al-Nuzul: Terdapat di dalam kitab Tafsir Al-Thabari bahwa diceritakan dari Muhammad bin al-Husain yang berkata, diceritakan dari Ahmad bin al-Mufdhil yang berkata, dari al-Suda, tentang firman Allah di atas. Ayat di atas diturunkan kepada Nabi Saw. ada dua orang yang berselisih dan datang kepada Nabi Saw. orang yang satu kaya dan orang lainnya miskin. Nabi Saw. lebih condong kepada orang miskin. Nabi Saw. berpendapat bahwa orang miskin tersebut tidak bersalah kepada orang kaya. Maka, Allah tidak menyukai kecuali Nabi Saw. menegakkan keadilan, baik kepada orang kaya maupun orang miskin. Allah berfirman: “jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karen ingin menyimpang dari kebenaran”.

<sup>25</sup>Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Cet. X; Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2014), h. 100.

Ayat ini menyerukan kaum mukminin untuk bangkit memainkan perannya di dalam menegakkan keadilan diantara manusia dengan caranya yang unik dan tidak mungkin dapat ditegakkan kecuali di tangan jamaah ini. Yaitu, keadilan yang dilakukan jamaah ini dalam bermuamalah dengan Allah, yang bersih dari segala kecenderungan, keinginan, dan kepentingan dengan segala sesuatu yang disebut kemaslahatan jamaah, umat, atau daulah. Juga yang lepas dari ungkapan lain selain takwa dan keridhaan Allah.

Pelajaran ini dimulai dengan seruan kepada orang-orang yang beriman agar menegakkan keadilan dengan bentuknya ini. Allah yang menurunkan Al-Qur'an ini mengetahui hakikat perjuangan yang berat yang harus dipikul umat ini di dalam menegakkan keadilan seperti itu. Padahal, di dalam jiwa manusia terdapat kelemahan yang sudah terkenal, dan terdapat rasa keberpihakan terhadap dirinya sendiri, kerabatnya, orang-orang yang lemah pada waktu sedang berperkara, orang yang kuat, orang tua dan kerabat, orang miskin dan orang kaya, orang yang dicintai dan orang yang dibenci.<sup>26</sup> Dia juga mengetahui bahwa untuk membersihkan dari semua pengaruh dan perasaan ini memerlukan perjuangan yang berat, untuk mendaki ke puncak yang tinggi ini dengan meninggalkan dataran yang rendah dan hina. Dalam melakukan semua itu, jiwa yang beriman tidak bergantung pada sesuatu pun selain pada tali Allah.

Islam juga telah mengajarkan kepada manusia agar tetap mematuhi pada dua perkara yang ditinggalkan oleh Rasulullah Saw yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits (sunnah), sebagaimana telah dijelaskan dalam hadits Rasulullah Saw tentang penganiayaan.

---

<sup>26</sup>Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zilāl al-Qur'an*, terj. As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, dan Muchotob Hamzah, *Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, h. 97.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَكِيمٍ بْنِ حَزَامٍ قَالَ مَرَّ بِالشَّامِ عَلَى أَنْاسٍ وَقَدْ أُقِيمُوا فِي الشَّمْسِ وَصُبَّ عَلَى رُؤُوسِهِمُ الزَّيْتُ فَقَالَ مَا هَذَا قِيلَ يُعَذَّبُونَ فِي الْحَرَجِ فَقَالَ أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذَّبُونَ فِي الدُّنْيَا

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakr bin Abu Syaibah]; Telah menceritakan kepada kami [Hafsh bin Ghiyats] dari [Hisyam bin 'Urwah] dari [Bapaknya] dari [Hisyam bin Hakim bin Hizam] dia berkata; "Saya pernah melewati beberapa orang di Syam yang dijemur di terik matahari sedangkan kepala mereka dituangi minyak. Kemudian Hisyam bertanya; 'Mengapa mereka ini dihukum? Seseorang menjawab; 'Mereka disiksa karena masalah pajak.' Hisyam berkata; 'Sesungguhnya saya pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Sesungguhnya Allah akan menyiksa orang-orang yang menyiksa orang lain di dunia.'"<sup>27</sup>

Dalam Islam pun orang akan berpikir seribu kali untuk melakukan perbuatan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan, karena dia tahu konsekuensi dari perbuatan tersebut adalah dibunuh (efek jera). Abu Aliyah mengatakan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa “Allah menjadikan Qishas sebagai jaminan keberlangsungan hidup, betapa banyak orang yang ingi membunuh tapi kemudian mengurungkan niatnya karena takut dirinya dibunuh (qishas).”<sup>28</sup> Tidak pandang bulu siapapun yang melakukannya baik rakyat, pejabat ataupun konglomerat.

Sebagian orang berprasangka bahwa qishas adalah hukuman yang kejam. Hal ini karena mereka memakai sudut pandang HAM-Barat yang melihat dari sisi pelaku, bukan dari sudut pandang Islam yang memandang dari sisi korban. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah al-Baqarah/2:179 yang berbunyi:

<sup>27</sup>Muhammad Vandestra. *Kitab Hadist Shahih Bukhari & Muslim Edisi Bahasa Indonesia*, h. 2527.

<sup>28</sup>Masjid nh.blogspot.co.id, *Fenomena Main Hakim Sendiri*, (di akses tanggal 4 April 2016).

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٨﴾

Terjemahan :

“Dan dalam qishas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa.”<sup>29</sup>

Pada ayat di atas Allah memberikan penjelasan tentang hikmahnya hukuman qishas itu, yaitu untuk mencapai keamanan dan ketenteraman. Karena dengan pelaksanaan hukum qishas, umat manusia tidak akan sewenang-wenang melakukan pembunuhan dengan memperturukkan hawa nafsunya saja dan mendasarkan pembunuhan itu kepada perasaan bahwa dirinya lebih kuat, lebih kaya, lebih berkuasa dan sebagainya.

Pada mulanya qishas dapat berlaku di dalam berbagai tindak pidana, seperti pembunuhan dibalas dengan pembunuhan, melukai dibalas dengan melukai, pemotongan dibalas dengan pemotongan, sebagaimana disyari’atkan pada Nabi Musa. Kemudian Allah mengkhususkan pemberlakuan qishas dalam pembunuhan bagi kaum muslimin, sebagai mana terdapat di dalam Al-Qur’an Surah al-Baqarah:2/178 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ  
بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۖ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ  
وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۖ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ  
ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

<sup>29</sup>Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Cet. X; Bandung: CV Penerbit



Terjemahan :

“Wahai orang-orang yang beriman. Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qishas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang yang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia mendapat azab yang sangat pedih.”<sup>30</sup>

Qishas itu bukanlah pembalasan untuk menyakiti, bukan pula untuk melampiaskan sakit hati. Tetapi, ia lebih agung dan lebih tinggi, yaitu untuk kelangsungan kehidupan, bahkan ia sendiri merupakan jaminan kehidupan. Kemudian untuk dipikirkan dan direnungkan hikmat difardhukannya, juga untuk menghidupkan hati dan memandunya kepada ketakwaan kepada Allah.

Jaminan kelangsungan hidup di dalam qishas bersumber dari berhentinya (tidak jadinya) para penjahat melakukan kejahatan sejak permulaan. Karena orang yang yakin bahwa dia harus menyerahkan hidupnya untuk membayar kehidupan orang yang dibunuhnya, maka sudah sepantasnya dia merenungkan, memikirkan, dan menimbang-nimbang. Kehidupan dalam qishas ini juga bersumber dari terobatnya hati keluarga si terbunuh apabila si pembunuh itu dibalas bunuh pula. Ini untuk mengobati hati dari dendam dan keinginan untuk melakukan serangan. Serangan yang tidak hanya terhenti pada batas tertentu saja, seperti pada kabilah-kabilah Arab hingga berlanjut menjadi peperangan yang sengit selama empat puluh tahun, seperti yang terjadi dalam Perang Basus yang terkenal di kalangan mereka itu, dan seperti yang kita lihat dalam realita hidup kita sekarang dimana kehidupan mengalir di tempat-tempat pembantaian dendam keluarga dari generasi ke generasi dengan tiada yang menghentikannya.

---

<sup>30</sup>Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Cet. X; Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), h. 27.

Konsep qishas terdapat kehidupan dalam arti yang lebih lengkap dan umum. Karena, perampasan terhadap kehidupan seorang manusia berarti perampasan terhadap kehidupan seluruhnya. Juga berarti kejahatan terhadap semua manusia yang hidup, yang sama-sama memiliki sifat kehidupan sebagaimana si terbunuh tadi. Apabila qishas terhadap seorang penjahat dapat mencegah terenggutnya jiwa seorang manusia, maka hal itu juga akan dapat mencegah perenggutan terhadap seluruh kehidupan. Sungguh di dalam tertahannya pembunuhan berikutnya (karena pelakunya sudah di qishas) itu terdapat jaminan kelangsungan hidup. Yakni, kehidupan yang mutlak, bukan cuma kehidupan perseorangan, bukan cuma kehidupan suatu keluarga, dan bukan cuma kehidupan satu kelompok.<sup>31</sup>

Maksud dari kata “Supaya kamu bertakwa” adalah ikatan yang menahan jiwa dari melakukan kejahatan, yakni kejahatan yang berupa pembunuhan dan kejahatan yang berupa serangan membabi buta sebagai pembalasan. Ikatan dan tambatan itu adalah “takwa”. Kepekaan hati dan rasa takutnya kepada Allah, yang menjadikannya bersedih apabila dimurkai Allah, dan menuntutnya untuk terus mencari ridha-Nya.

Tanpa ikatan dan tambatan ini tidak mungkin syariat dapat berdiri dengan tegak, undang-undang tidak akan dapat berjalan, pelaku kejahatan dan pelanggaran tak akan merasa bersedih hati dengan tindakannya itu, dan tidaklah memadai peraturan-peraturan dan segala undang-undang yang kosong dari ruh, sensitivitas, rasa takut, dan antusiasme terhadap kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan manusia sendiri.

Inilah faktor yang menyebabkan jarang terjadi tindak kejahatan yang diancam dengan hukuman had pada zaman Nabi Saw. dan zaman Khulafaur

---

<sup>31</sup>Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zilāl al-Qur'an*, h. 196.

Rasyidin. Kalau terjadi tindak kejahatan maka kebanyakan pelakunya datang atas kemauannya sendiri dengan penuh kesadaran mengakui kesalahannya. Hal itu terjadi karena di dalam hatinya ada rasa “takwa”. Takwa itulah yang menjadi penjaga yang selalu sadar di dalam nurani, yang menahannya agar tidak mendekati pagar pembatas. Sebaliknya, dibawahnya hati ini ke sisi syariat yang terang cemerlang dan selalu memandang kepada relung-relung fitrah dan unsur-unsur bangunan kalbu.

Sayyid Abul Hasan Ali al-Hasani an-Nadawi dalam buku *Maa dzaa Khasiral-Aalam bi-Inhithaathil Muslimin* mengatakan bahwa apabila suatu waktu kekerasan kebinatangan demikian besar, nilai kemanusiaan sudah jatuh, karena sudah tidak ada pengawasan dan tidak mempan pengawasan, dan tidak terjangkau oleh undang-undang, maka kondisi yang demikian ini mengubah iman menjadi jiwa yang sangat kritis, menyengat dan menusuk hati, dan membuat pemiliknya tidak tenang. Sehingga, dia mengakui dosanya di hadapan undang-undang, menyediakan dirinya untuk dihukum, dan siap menanggungnya dengan hati yang tegar, demi menebus dirinya dari kemurkaan Allah dan azab akhirat.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup>Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zilāl al-Qur'an*, h. 197.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

###### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris yaitu penelitian yang lebih ditekankan pada penerapan hukum di lapangan, sehingga akan lebih banyak disadarkan pada pengumpulan data lapangan dengan maksud untuk mengkonstruksikan kenyataan dengan penerapan hukumnya. Dengan fokus penelitian pada faktor yang menyebabkan terjadinya main hakim sendiri pada masyarakat, dan upaya penegak hukum dalam mengantisipasi/mencegah terjadinya main hakim sendiri, serta penerapan hukum pada masyarakat yang main hakim sendiri dalam perspektif hukum Islam.

###### **2. Lokasi Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis memilih lokasi penelitian di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di Pengadilan Negeri Sungguminasa dan di Desa Manimbahoi Dusun Pattiro Kecamatan Parigi pada masyarakat dengan maksud untuk mendapatkan informasi mengenai tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa terhadap terduga tindak kejahatan, yang didasarkan pada pertimbangan bahwa di Kabupaten Gowa tersebut masih banyak tindakan main hakim sendiri, sehingga penulis berharap akan mudah memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

##### ***B. Pendekatan Penelitian***

1. Pendekatan yuridis adalah suatu metode yang menekankan pada suatu penelitian yang melihat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pendekatan sosiologis di mana suatu pendekatan yang melihat kaidah-kaidah yang terdapat pada penelitian ilmu sosiologis. Dalam penelitian ini

mengajak untuk melihat kejadian yang terjadi dalam masyarakat.

3. Pendekatan Normatif syar'I (Teologi Normatif), pendekatan ini melihat apa yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist serta pendapat para ulama.

### **C. Sumber Data**

1. Data primer, data ini didapatkan melalui field researd, penelitian langsung dengan melihat di lapangan dengan cara interview. Dengan terjun langsung ke lapangan dengan mengadakan wawancara (tanya jawab) pada pemerintah setempat yang bersangkutan.
2. Data sekunder, suatu data yang bersumber pada penelitian kepustakaan, yaitu data yang tidak didapatkan secara langsung dari sumber pertamanya melainkan bersumber dari buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta jurnal yang berkaitan.

### **D. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *library research* (riset kepustakaan) dan *field research* (riset lapangan). Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain adalah:

1. *Library Research* (Riset Kepustakaan)  
Mengumpulkan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan cara mengumpulkan data-data atau dokumen-dokumen maupun literatur-literatur yang terkait dengan penelitian ini.
2. *Field Research* (Riset Lapangan)
  - a. Observasi, metode atau cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung.

Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan terhadap objek penelitian untuk mengetahui ada/tidaknya fakta atau kenyataan kehidupan yang dicari dalam penelitian tersebut.<sup>33</sup>

- b. Wawancara atau Interview, adalah pertemuan antara dua orang atau percakapan dua orang untuk mendapatkan informasi melalui pertanyaan, dimana ada yang bertindak sebagai informan dan ada yang bertindak sebagai pewawancara.

Teknik wawancara atau interview merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian. Karena menyangkut data, wawancara merupakan salah satu elemen penting dalam proses penelitian. Wawancara (interview) dapat diartikan sebagai cara untuk mendapatkan informasi (data) dari responden dengan cara bertanya langsung, bertatap muka (*face to face*) atau memanfaatkan sarana komunikasi lain, misalnya telepon dan internet.<sup>34</sup>

- c. Studi dokumen teknik pengumpulan data dengan dokumen yang relevan dengan permasalahan penelitian, yaitu suatu peraturan undang-undang dalam masyarakat, serta berbagai bahan bacaan yang berkaitan dengan judul penelitian.

---

<sup>33</sup>Bagong Suyanto & Sutinah, *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan*. (cet.3, Jakarta : Kencana, 2007), h. 83.

<sup>34</sup>Bagong Suyanto & Sutinah, *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan*. (cet.3, Jakarta : Kencana, 2007), h. 69.

### ***E. Instrumen Penelitian***

Adapun instrumen penelitian yang digunakan peneliti sendiri karena peneliti lebih kenal maksud dan tujuan penelitian ini dengan menggunakan.

#### **1. Peneliti**

Peneliti adalah orang yang melakukan suatu penelitian dalam hal ini peneliti.

#### **2. Pedoman Wawancara**

Pedoman wawancara ini digunakan untuk menggunakan wawancara untuk dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa pertanyaan agar proses wawancara lebih terarah dan tidak terjadi kekeliruan.

#### **3. Buku dan Alat Tulis**

Digunakan untuk mencatat semua percakapan yang didapatkan dari sumber wawancara.

#### **4. Kamera**

Digunakan untuk memotret proses penelitian dalam melakukan wawancara dan berbagai kegiatan yang dianggap penting.

#### **5. Tape Recorder/Headphone (HP)**

Digunakan untuk merekam semua proses wawancara dengan informan. Karena jangan sampai data yang dicatat kurang akurat maka hasil rekaman dapat digunakan untuk menyempurnakannya.

### ***F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data***

#### **1. Pengolahan Data**

Pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan yang sesuai dengan tujuan, rancangan dan sifat penelitian. Suyanto dan Sutinah (2006:173), mengatakan pengolahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan



dengan cara mengklarifikasikan dan mengkategorikan data dengan berdasarkan beberapa tema sesuai fokus penelitiannya. Pengolahan data dalam penelitian ini terdiri dari :

**a. Reduksi Data**

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan penelitian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Di mana langkah-langkah yang dilakukan untuk menajamkan analisis, menggolongkan kedalam setiap permasalahan melalui uraian singkat, megarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasikan. Kemudian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah penelitian melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan.

**b. Penyajian Data**

Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data merupakan suatu langkah penting menuju tercapainya suatu penelitian kualitatif yang valid dan handal.

**c. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi**

Tahap ini adalah tahap dimana penarikan kesimpulan dari data-data yang telah di kumpulkan dari hasil penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari dan memahami makna/arti, keteraturan pola-pola penjelasan alur sebab akibat atau proposi. Di mana

sebelum penarikan kesimpulan dilakukan cara reduksi data dan penyajian data selanjutnya penarikan kesimpulan dari kegiatan-kegiatan sebelumnya.

## **2. Analisis Data**

Analisis data adalah proses pengelolaan data dalam bentuk yang sederhana supaya dapat dimengerti, di pahami serta di terpretasikan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis kualitatif. Kualitatif adalah menganalisis data-data atau menggambarkan data hasil penelitian di lapangan dengan cara kata-kata tanpa menganalisis angka-angka dan selanjutnya pengolahan data disajikan secara deskriptif analisis dengan menggambarkan secara lengkap mengenai masalah-masalah berdasarkan penelitian lapangan.

**BAB IV**

**PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRECHTING) PADA  
MASYARAKAT KECAMATAN PARIGI DESA MANIMBAHOI DUSUN  
PATTIRO KABUPATEN GOWA (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**

**A. *Gambar Umum Lokasi Penelitian***

Keadaan dari suatu daerah yang menyangkut situasi dan kondisi serta keadaan penduduknya sangat erat hubungannya dengan perkembangan kota. Keadaan geografis dan demografis adalah ciri khas dari suatu daerah. Untuk daerah tingkat II Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut.

**1. Sejarah Kabupaten Gowa**

Dalam khasana sejarah nasional, nama Gowa sudah tidak asing lagi. Mulai abad ke-15, Kerajaan Gowa merupakan kerajaan maritime yang besar pengaruhnya di perairan Nusantara. Bahkan dari kerajaan ini juga muncul nama pahlawan nasional yang bergelar Ayam Jantan dari Timur, Sultan Hasanuddin, Raja Gowa XVI yang berani melawan VOC Belanda yang pada tahun awal kolonialisme di Indonesia. Kerajaan Gowa yang memang akhirnya takluk kepada Belanda lewat perjanjian Bungaya. Namun meskipun sebagai kerajaan Gowa tidak lagi berjaya, kerajaan ini mampu memberikan warisan terbesarnya yaitu Pelabuhan Makassar. Pelabuhan yang kemudian berkembang menjadi Kota Makassar dapat disebut anak kandungnya, sedangkan kerajaan Gowa sendiri merupakan cikal bakal Kabupaten Gowa sekarang.

Kemampuan Kabupaten Gowa menyuplai kebutuhan bagi daerah sekitarnya dikarenakan keadaan alamnya, Kabupaten seluas 1.883,32 Kilometer Persegi ini memiliki enam gunung, dimana yang tertinggi adalah Bawa Karaeng. Daerah ini juga dilalui Sungai Je'neberang yang daerah pertemuannya dengan Sungai Je'nelata dibangun waduk Bili'-bili'. Keuntungan alam ini menjadikan

tanah Gowa kaya akan bahan galian, disamping tanahnya subur.

## **2. Letak Geografis**

Kabupaten Daerah tingkat II Gowa Terletak  $\pm 20$  Km dari Makassar ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, berada pada  $12^{\circ}38,6$  BT dari Jakarta dan  $5^{\circ}33'6''$ BT dari Kutub Utara. Sedangkan letak wilayah Administrasinya antara  $12^{\circ}33'19''$  hingga  $13^{\circ}15'17$  BT dan  $5^{\circ}5'$  LS hingga  $5^{\circ}34.7'$  LS dari Jakarta.

Kabupaten yang merupakan daerah otonom ini, Disebelah utara berbatasan dengan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Disebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai. Disebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar.

Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu sekitar 72,26% terutama dibagian timur dan selatan karena merupakan pegunungan. Dari total luas kabupaten Gowa 35,30% mempunyai keiringan tanah diatas 40 derajat.

Salah satu Kecamatan di Kabupaten gowa adalah kecamatan Somba Opu di mana luas wilayah 28.09 kilometer persegi atau 2.809 Ha (1,49% dari luas Kabupaten Gowa dengan ketinggian daerah/altitude berada 25 meter diatas permukaan laut. Sebagian besar wilayah terletak pada daratan rendah dengan kordinat geografis berada pada 5 derajat  $12'5''$  LS dan 119 derajat  $27'15''$  BT. Batas alam dengan Kecamatan Pallangga adalah Sungai Je'neberang yaitu sungai dengan panjang 90 Km dan luas Daerah aliran 881 Km persegi.

Kecamatan Somba Opu juga merupakan Kecamatan yang paling banyak penduduknya untuk wilayah perkotaan, yakni sebanyak 130.126 orang dimana jumlah penduduk Laki-laki sebesar 64.442 orang dan perempuan sebesar 65.684.

Di Kecamatan inilah pusat perkantoran atau dinas-dinas yang terdapat di Kabupaten Kowa dan ini juga adalah Ibu Kota dari Kabupaten Gowa dan di sini pula pusat perekonomian masyarakat terdapat pasar sentral.

Ada juga kecamatan Tinggi Moncong di mana Kecamatan ini adalah daerah wisata yaitu Malino di mana masyarakat menamainya Malino Kota Bunga. Daerah ini terletak 90 km dari Kota Makassar ke arah selatan. Di kawasan ini terdapat hutan wisata berupa pohon pinus yang tinggi berjejer di antara bukit dan lembah. Jalan menanjak dan berbelok-belok dengan melintasi deretan pegunungan dan lembah yang indah bak lukisan alam.

Malino juga merupakan daerah penghasil buah-buahan dan sayur-sayuran yang tumbuh dilereng Gunung Bawaraeng, sebagian masyarakat juga masi mengukulturkan gunung itu sebagai tempat suci dan keramat. Suhu di Malino ini mulai dari 10°C samapai 26°C.

Sebelum muncul nama Malino, dulu Masyarakat setempat menamakannya Kampung Lapparak. Lapparak dalam bahasa Makassar berarti datar yang berarti daerah itu saja yang datar yang berada diantara lereng-lereng gunung yang berdiri kokoh. Daerah Malino mulai dikenal dan semakin populer di jaman Belanda lebih-lebih setelah Gubernur Gendral Caron yang memerintah pada tahun 1927 memerintah di “*CELEBES*” menjadikannya tempat peristirahatan bagi parah pegawai pemerintahan.

Kecamatan Parigi adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia. Kecamatan Parigi merupakan kecamatan hasil pemekaran dari Kecamatan Tinggimoncong pada tahun 2006 dengan luas wilayah sekitar 132,76 Km<sup>2</sup>. Kecamatan terbagi atas 5 (lima) desa, yaitu Desa Bilanrengi, Desa Jonjo, Desa Majannang, Desa Manimbahoi, Desa Sicini, dan Ibu kotanya berada di Desa Majannang. Di Kecamatan Parigi ini khususnya di Desa Manimbahoi Dusun Pattiro merupakan lokasi penelitian penulis dalam mengambil data dan informasi pada masyarakat setempat mengenai kasus pengeroyokan yang terjadi di Desa Manimbahoi Dusun Pattiro tersebut dalam rangka untuk menyelesaikan

penyusunan skripsi ini. Peneliti juga melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Sungguminasa Kabupaten Gowa, Kecamatan Somba Opu, untuk mendapatkan data dan informasi yang lebih lengkap dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

### **3. Sejarah Masuknya Islam Di Gowa**

Penyebaran Islam di Nusantara pada awalnya tidak bisa di lepaskan dari aktivitas perdagangan. Demikian halnya dengan kedatangan Islam di Gowa. Penyebaran Islam yang dilakukan oleh pedagang dimungkinkan karena di dalam ajaran Islam tidak dibedakan antara tugas keagamaan seorang muslim, sebagai penyebar nilai-nilai kebenaran dan profesinya sebagai pedagang, setiap Muslim apapun profesinya di tuntuk untuk menyampaikan ajaran Islam meskipun cuma satu ayat.

Sekalipun para pedagang Muslim sudah ada berada di Sulawesi Selatan sejak abad XV, tidak diperoleh keterangan pasti baik dari sumber lokal maupun sumber dari luar tentang terjadinya konversi ke dalam Islam oleh salah seorang raja setempat saat itu sebagaimana yang terjadi pada agama katolik.

Agaknya inilah yang menjadi faktor pendorong para pedagang melayu mengundang tiga orang mubalig dari kota tengah Minangkabau ke Makassar untuk mengislamkan para elit Kerajaan Gowa-Tallo. Inisiataif untuk mendatangkan mubalig khusus untuk ke Makassar sudah ada sejak Nakhoda Bonang. Ia adalah seorang Ulama dari Minangkabau sekaligus pedang di Gowa pada pertengahan Abad XVI (1525).

Keberhasilan penyebaran Islam terjadi setelah memasuki awal Abad XVII dengan kehadiran tiga orang mubalig yang bergelar Datuk dari Minangkabau. Ketiga ulama tersebut yang berasal dari Kota Tengah Minangkabau diutus oleh Sultan Aceh dan Sultan Johor untuk mengembangkan dan menyebarkan Islam di

Sulawesi Selatan. Mereka terlebih dari mempelajari Budaya orang Bugis-Makassar.

Sejak Agama Islam menjadi agama resmi di Gowa-Tallo, Raja Gowa Sultan Alauddin makin kuat kedudukannya sebab Beliau juga diakui sebagai Amirul Mukminin (Kepala Agama Islam) dan kekuatan Bate Salapanga diimbangi oleh Qadhi yang menjadi wakil raja untuk urusan Keagamaan bahkan oleh orang-orang Makassar, Bugis dan Mandar yang telah lebih dulu memeluk Islam. Sultan Alauddin dipandang sebagai pemimpin Islam di Sulawesi Selatan.

Cara pendekatan yang dilakukan Sultan Alauddin dan pembesar Kerajaan Gowa adalah mengingatkan perjenjian persaudaraan lama antara Gowa dan Negeri atau Kerajaan yang takluk tau bersahat dengan bunyi antara lain *“barang siapa diantara Gowa dan sekutunya atau daerah taklukannya melihat satu jalan kebajikan, maka salah satu dari mereka yang melihat itu harus menyampaikan kepada pihak lainnya”*

Karena dengan dalih bahwa Gowa sekarang sudah melihat jalan kebajikan yaitu Agama Islam Kerajaan Gowa meminta kepada Raja-raja taklukannya agar turut memeluk Agama Islam. Penyebaran Islam yang dilakukan oleh Raja Gowa-Tallo di seluruh Sulawesi Selatan. Bahkan sampai ke bagian timur Nusantara telah memberikan pengaruh dan perubahan terhadap kehidupan sosial Masyarakat yang meliputi segala bidang baik aspek politik maupun pemerintahan, ekonomi maupun sosial budaya. Tentu perubahan ini mengarah ke Islamisasi segala aspek tersebut. Karena begitu kuatnya pengaruh islam yang dikembangkan oleh Mubalig dengan dukungan para Raja-raja yang telah memeluk islam, maka rakyat berbondong bondong memeluk Islam tanpa dipaksa maupun di ancam.

**B. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Main Hakim Sendiri Pada Masyarakat.**

Tindakan main hakim sendiri (*Eigenrechting*) adalah suatu tindakan sewenang-wenang di mana tindakan tersebut telah mencelakakan seseorang yang masih diduga melakukan suatu tindak pidana. Perlakuan tindak pidana seperti tindakan main hakim sendiri ini telah melanggar undang-undang yang berlaku dan telah berkembang di dalam masyarakat, seperti pada kasus main hakim sendiri yang terjadi di Dusun Pattiro Desa Manimbahoi Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa, berdasarkan hasil putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 408/Pid.B/2017/PN Sgm bahwa awalnya korban Sanuddin berada ditempat pesta pernikahan, pada saat itu korban Sanuddin melihat terdakwa satu Sarudding, terdakwa dua Cu'la, dan terdakwa tiga Nurdin mondar-mandir di sekitar panggung elekton, kemudian korban Sanuddin pulang ditengah perjalanan korban melihat terdakwa satu Sarudding, terdakwa dua Cu'la, dan terdakwa tiga Nurdin berdiri di sebelah kanan jalan dan menahan korban Sanuddin kemudian terdakwa satu Sarudding langsung memukul korban pada bagian kepala sebelah kanan, sehingga korban terputar kemudian terdakwa tiga Nurdin juga ikut memukul korban pada bagian kepala dan ikut terdakwa dua Cu'la menendang bagian rusuk korban sehingga korban terjatuh dan tidak sadarkan diri. Berdasarkan kronologi dalam putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 408/Pid.B/2017/PN Sgm terkait dengan kasus pengeroyokan tersebut bahwa korban dengan para terdakwa sebelumnya memiliki masalah yaitu masalah irigasi akan tetapi sudah diselesaikan oleh pemerintah setempat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan warga setempat Dusun Pattiro Desa Manimbahoi mengatakan bahwa terdakwa dua Cu'la merupakan dalang di balik kasus pengeroyokan tersebut, sedangkan terdakwa satu Sarudding



dan terdakwa tiga Nurdin merupakan eksekutor dalam kasus pengeroyokan tersebut. Warga Dusun Pattiro Desa Manimbahoi yang bernama Amri juga mengatakan bahwa pada saat sebelum terjadinya kasus pengeroyokan tersebut tepatnya di sebuah pesta pernikahan, saudara Amri bersama dengan Bapaknya yang selaku Kepala Desa Manimbahoi saat ini ingin beranjak pulang dari pesta pernikahan dan saudara Amri melihat terdakwa dua Cu'la dan kemudian saudara Amri menyapanya dan terdakwa dua Cu'la mengatakan "*mau mako pulang?*" saudara Amri menjawab "*iye*", dan setelah beberapa saat kemudian tidak lama setelah saudara Amri tiba di kediamannya tiba-tiba ada panggilan telepon dari warga setempat kepada Bapaknya bahwa telah terjadi pengeroyokan di dekat pesta pernikahan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dua Cu'la, terdakwa satu Sarudding, dan terdakwa tiga Nurdin terhadap korban Sanuddin.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan warga Dusun Pattiro Desa Manimbahoi, maka terdapat kesimpulan-kesimpulan yang dapat diambil untuk menjawab faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya main hakim sendiri pada masyarakat, yaitu sebagai berikut :

1. Faktor penyebab masyarakat main hakim sendiri yaitu, masyarakat dalam melakukan tindakan main hakim sendiri disebabkan karena adanya faktor dorongan yang diberikan oleh masyarakat lainnya, menjadikan satu masyarakat lainnya menjadi ikut-ikutan dalam melakukan aksi tindakan main hakim sendiri tersebut.
2. Faktor penyebab masyarakat main hakim sendiri yaitu, masyarakat tersebut memiliki sikap kurang percaya terhadap hukum yang berlaku, dikarenakan adanya proses penegakkan hukum yang tidak baik. Contohnya dengan melakukan sogokan terhadap pihak penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan) oleh pelaku ataupun sebaliknya, agar terciptanya suatu

penegakkan hukum yang tidak sesuai dengan perundang-undangan.

3. Faktor penyebab masyarakat main hakim sendiri yaitu, dikarenakan masyarakat belum paham betul bahwa ada hukum yang berlaku dan tidak sepatutnya untuk dilanggar, terkait kasus pengeroyokan di Dusun Pattiro Desa Manimbahoi tersebut oleh warga mengatakan bahwa masyarakat akan mengetahui apa itu hukum jika mereka telah berada di dalam jeruji besi.
4. Faktor penyebab masyarakat main hakim sendiri yaitu, karena masyarakat yang melakukan tindakan main hakim sendiri ini pernah mengalami suatu tindak pidana dan menjadi korban dalam tindakan kejahatan, ataupun keluarganya pernah menjadi korban dalam tindak pidana tersebut, maka dilakukannya suatu pembalasan dendam untuk memenuhi hasrat yang timbul pada diri masyarakat yang menjadi korban kejahatan tersebut.
5. Faktor penyebab masyarakat main hakim sendiri yaitu, dikarenakan adanya situasi yang memungkinkan mereka melakukan tindakan main hakim sendiri, pertama kurangnya kesigapan polisi untuk langsung datang ketempat kejadian, yang kedua karena massa yang begitu banyak jadi mereka berpikir jika melakukan tindakan main hakim sendiri maka tidak ada yang dapat mengetahui siapa-siapa saja yang melakukannya karena banyaknya massa tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, maka terdapat kesimpulan-kesimpulan yang dapat diambil untuk menjawab faktor-faktor penyebab terjadinya main hakim sendiri pada masyarakat, yaitu sebagai berikut :

1. Faktor penyebab masyarakat main hakim sendiri yaitu, masyarakat bersikap emosional, banyak faktor yang menyebabkan mereka bersikap emosional, yaitu dengan mereka melihat tindak kejahatan disekitarnya bagi mereka yang

mengerti akan hukum mereka melakukan tindakan main hakim sendiri itu dengan bebas tidak adanya sikap merasa bersalah, masyarakat tidak dapat mengendalikan dirinya jika mendapati tindak kejahatan yang melukai orang lain disekitarnya, karena itu sudah menjadi suatu respon secara spontan.

2. Faktor penyebab masyarakat main hakim sendiri yaitu, karena adanya faktor ikut-ikutan.
3. Faktor penyebab masyarakat main hakim sendiri yaitu, karena dengan adanya situasi yang memungkinkan mereka melakukan tindakan main hakim sendiri.
4. Faktor penyebab masyarakat main hakim sendiri yaitu, ketika mereka sudah selesai melakukan tindakan main hakim sendiri pak hakim memberikan pendapat bahwa mereka melakukannya dalam keadaan sadar terhadap apa yang mereka perbuat.

***C. Upaya Penegak Hukum Dalam Mengantisipasi/Mencegah Terjadinya Main Hakim Sendiri.***

Dalam perbuatan main hakim sendiri ada faktor yang menyebabkan mengapa seseorang melakukan tindakan main sendiri, di samping itu di dalam perbuatan main hakim sendiri ada juga suatu upaya mengantisipasi atau mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri. Masyarakat pada umumnya mengharapkan adanya suatu pergerakan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di dalam instansi lembaga hukum (polisi, jaksa, hakim) untuk lebih berperan aktif dalam melakukan suatu tindakan untuk menanggulangi tindakan main sendiri.

Perbuatan main hakim sendiri ini yang terlibat adalah sekelompok orang yaitu masyarakat yang melakukan suatu perbuatan tersebut, bila yang melakukan adalah sekelompok orang berarti banyak massa yang ikut berperan serta di dalam perbuatan main hakim sendiri ini, lebih dari itu mereka (masyarakat) melakukan

tindakan anarkis, melakukan tindakan tersebut dengan kekerasan, dan pengeroyokan. Sudah sangat jelas bahwa tindakan main hakim sendiri itu dilarang oleh undang-undang, akan tetapi masyarakat lebih memilih melakukan penghakiman dengan caranya sendiri dari pada menyerahkannya kepada pihak yang berwenang, masyarakat tidak mempercayai hukum yang berlaku, bila masyarakat itu mengerti akan hukum dan mempercayai hukum maka masyarakat akan menyerahkannya pada pihak yang berwenang.

Peraturan perundang-undang khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur secara khusus mengenai main hakim sendiri, lantas bukan berarti KUHP tidak dapat diterapkan sama sekali jika terjadi perbuatan main hakim sendiri. Di dalam KUHP yang berkaitan dengan tindakan main hakim sendiri diatur dalam Pasal 351 tentang Penganiayaan :<sup>35</sup>

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak pidana.

Hal ini dapat diancamkan atas tindakan main hakim sendiri yang dilakukan di depan umum, yaitu Pasal 170 tentang Kekerasan :<sup>36</sup>

1. Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana

---

<sup>35</sup>Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Edisi II (Jakarta : Cahaya Prima Sentosa, 2015), h. 65.

<sup>36</sup>Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Sanksi Hukum Bagi Pelaku Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang Di Muka Umum, Pasal 170.

penjara paling lama lima tahun enam bulan.

2. Yang bersalah diancam;

- a. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
- b. Dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
- c. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Ketika seseorang melakukan tindakan main hakim sendiri maka pasal-pasal tersebut dapat dikenakan kepada siapa saja yang melakukan tindakan tersebut, baik itu melakukannya karena faktor emosional, ikut-ikutan, kurang mempercayai hukum, dan situasi. Tindakan seperti main hakim sendiri tidak dibenarkan dalam hukum, sehingga dapat dikenakan terhadap orang yang melakukannya. Adapun bila orang yang melakukan tindakan main sendiri itu sampai mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang maka dapat dikenakan dalam Pasal 338 KUHP tentang Kejahatan terhadap Nyawa, “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa agar mendapatkan suatu pandangan penegakan hukum dalam mengantisipasi/mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri, yaitu sebagai berikut :

1. Dalam hal penegakan hukum untuk mengantisipasi/mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri yaitu, hakim lebih terbatas pada kewenangan tersebut hakim hanya berwenang pada proses pengadilan hingga penjatuan

putusan. Adapun yang berkaitan dengan hal tersebut hakim lebih kepada hal-hal seperti sosialisasi ke masyarakat.

2. Dalam hal penegakan hukum untuk mengantisipasi/mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri yaitu, pengadilan itu fungsinya menerima perkara, yang lebih bersentuhan dengan masyarakat adalah dari pihak penyidik ataupun kepolisian yang ditugaskan kepada bhabinkamtibmas. Langkah pengadilan lebih kepada penyuluhan hukum, memeriksa dan mengadili perkara dalam proses pengadilan, terkait dengan tugas pokok hakim tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat.
3. Dalam hal penegakan hukum untuk mengantisipasi/mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri yaitu, khususnya hakim lebih kepada proses pengadilan itu sendiri mulai dari menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara.

Kewenangan Polisi, Jaksa, Hakim di samping untuk menegakkan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan namun juga memberikan sebuah pengarahan atau pembelajaran mengenai hukum kepada masyarakat. Berdasarkan teori sistem peradilan pidana di Indonesia bahwa dalam upaya penegakan dalam mengantisipasi/mencegah terjadinya main hakim sendiri lembaga hukum harus menjadikan suatu masyarakat yang taat akan hukum, dan dilakukannya upaya-upaya penegakan dalam mengantisipasi/mencegah terjadinya main hakim sendiri, seperti memberi penyuluhan tentang hukum kepada masyarakat, memberi sebuah apresiasi kepada setiap warga masyarakat yang memperdamaikan suatu permasalahan di daerahnya tersebut.

Adapun cara mengantisipasi/mencegah terjadinya main hakim sendiri dengan melakukan tindakan preventif, tindakan preventif merupakan upaya pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya peristiwa pidana dalam hal

penanggulangan kejahatan. Tindakan preventif yang dilakukan yaitu :

### 1. Preventif (Pencegahan)

- a. Membangun kewibawaan dan kepastian hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat

Perilaku menyimpang dalam masyarakat seperti perbuatan main hakim sendiri tentunya harus segera diobati. Untuk menemukan obat pertama kali perlu dikenali akar permasalahan munculnya tindakan main hakim sendiri tersebut. Mengingat bahwa akar masalahnya adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap pranata hukum, maka fungsi hukum perlu dilaksanakan secara konsekuen dan professional oleh aparat penegak hukum. Membangun dan menguatkan system hukum yang berfungsi sesuai treknnya, tidak ada diskriminasi terhadap siapa pun yang berurusan dengan hukum. Rakyat berharap hukum bukan sekedar produk politik untuk melindungi kepentingan tertentu, melainkan yang berkeadilan, melindungi semua orang dan golongan tanpa diskriminasi. Upaya ini pada akhirnya akan menumbuhkan kewibawaan dan kepastian hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat.

- b. Himbauan dan penyuluhan hukum

Dalam membangun kesadaran dan kepatuhan hukum, kepolisian melalui Bapemkamtibmas (Badan Pembina Ketertiban dan Keamanan Masyarakat) menggalakkan sosialisasi/penyuluhan hukum. Hal tersebut diharapkan agar masyarakat memahami bahwa tindakan main hakim sendiri adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum dan dapat dipidanakan.

### 2. Represif (Penindakan)

Proses hukum terhadap perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat tetap bisa diproses secara hukum, sama halnya dengan perbuatan

perbuatan hukum lainnya. Pelaku tindakan main hakim sendiri ini tetap bisa ditangkap namun pada prakteknya jarang terjadi dikarenakan yang menjadi korban penghakiman massa ataupun keluarganya tidak melaporkan atau mempermasalahkan penganiayaan atau pengeroyokan yang dialaminya.

#### **D. Penerapan Hukum Pada Masyarakat Yang Main Hakim Sendiri Dalam Perspektif Hukum Islam.**

Islam sangat menghormati hak asasi manusia, hal tersebut terlihat dari adanya hukum dalam lingkup Islam yang mengatur mengenai hukuman bagi orang yang melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain. Hukum-hukum itu ada yang telah ditetapkan dan tidak dapat ditawar oleh umat Islam, maksudnya adalah umat Islam tinggal menjalankan hukum yang tertulis dalam al-Qur'an maupun Hadist tanpa adanya penawaran. Ada juga hukuman yang dapat diganti oleh umat Islam, ada kesepakatan dari kedua belah pihak yang bermasalah serta ada juga hukuman yang dapat ditentukan oleh hakim didasarkan pada kondisi dari orang yang melakukan kesalahan selama tidak melakukan kesalahan sebagaimana yang diatur dalam al-Qur'an.<sup>37</sup>

Dalam hukum pidana Islam istilah tindak pidana biasa disebut dengan kata *jarimah*, yang berarti tindak pidana. Kata lain yang sering digunakan untuk pidana istilah *jarimah* ialah *jinayah*. Hanya di kalangan fuqaha istilah *jarimah* pada umumnya digunakan untuk semua pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang oleh syara' baik mengenai jiwa ataupun lainnya. Sedangkan *jinayah* pada umumnya digunakan untuk menyebutkan perbuatan pelanggaran mengenai jiwa atau anggota badan, seperti membunuh dan melukai anggota badan tertentu.<sup>38</sup>

*Jinayah* berasal dari kata "*jana yajni jinayah*", yang berarti memetik, dosa

---

<sup>37</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), h. 17.

<sup>38</sup>Yusuf, Imaning, *Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam*, (Palembang : Rafah Press, 2009), h. 26.



atau kesalahan. *Jinayah* menurut bahasa adalah seseorang yang memanfaatkan sesuatu dengan cara yang salah. Menurut istilah *jinayah* adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal, atau harta benda. Adapun *Al-Ahkam Al-Jinayah* adalah hukum pidana biasa disebut juga hukum publik. *Al-Ahkam Al-Jinayah* dalam Islam untuk melindungi kepentingan dan keselamatan umat manusia dari ancaman tindak kejahatan atau pelanggaran, sehingga tercipta situasi kehidupan yang aman dan tertib. Sedangkan pengertian *jarimah* menurut *Al-Sulthoniah* adalah segala larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukum *had* atau *ta'zir*.

Hukum pidana Islam di Indonesia bukanlah merupakan hukum positif. Keberadaannya hanyalah sebagai suatu disiplin ilmu.<sup>39</sup> Dan juga merupakan terjemahan dari kata fiqih *jinayah*. Fiqih *jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Qur'an dan Hadits. Tindakan kriminal dimaksud, adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits.<sup>40</sup>

Setiap tindak pidana dalam hukum Islam memiliki unsur-unsur tertentu apabila seseorang telah memenuhi syarat yang dimaksud dalam perbuatan (tindak) pidana, maka seseorang tersebut telah dianggap melakukan tindak pidana dan wajib mendapatkan perlakuan hukum sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukannya.<sup>41</sup>

<sup>39</sup>A Jazuli, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), h. 5.

<sup>40</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h. 1.

<sup>41</sup>Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 527.

Ulama fiqih mengemukakan unsur yang harus ada dalam suatu tindak pidana sehingga perbuatan itu dapat dikategorikan dalam perbuatan tindak pidana. Adapun unsur-unsur itu adalah : **Pertama**, ada nash yang melarang perbuatan tersebut dan ancaman formil (*ar-Rukn al-syar'i*). Dalam unsur ini ulama membuat kaedah “Tidak ada sesuatu tindak pidana dan tidak ada pula suatu hukuman tanpa ada nash”. Senada dengan kaedah tersebut juga dikatakan “sebelum ada nash, tidak ada hukum bagi orang-orang yang berakal”. Oleh Haliman menyebutkan unsur ini dengan “sifatnya melawan hukum”. **Kedua**, adanya tingkah laku yang membentuk perbuatan jarimah, baik berupa perbuatan yang nyata melanggar larangan syara', jarimah positif aktif melakukan sesuatu perbuatan seperti mencuri maupun dalam bentuk sikap tidak berbuat sesuatu yang diperintahkan syara' jarimah negative pasif melakukan perbuatan seperti tidak melaksanakan shalat dan tidak menunaikan zakat. Dalam hukum pidana positif unsur ini disebut unsur materil (*al-rukun al-madiy*). Menurut Halimah bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang oleh hukum dinyatakan perbuatan yang dapat dihukum. **Ketiga**, pelaku jarimah (tindak pidana) adalah seseorang yang telah mukallaf atau orang yang telah dapat dipertanggungjawabannya secara hukum, dalam hukum pidana Islam disebut *al-rukun adabi*. Dalam hukum pidana positif disebut unsur moril oleh Haliman menyebutkannya orang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dipersalahkan atau disesalkan atas perbuatannya.<sup>42</sup>

Di samping unsur umum seperti yang dikemukakan tersebut terdapat juga unsur-unsur khusus yang terdapat dan berlaku pada setiap tindak pidana. Unsur khusus artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada jenis *jarimah* tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis *jaimah* yang satu dengan jenis *jarimah* yang lainnya. Menurut para *fuqahā* tindak pidana selain jiwa (penganiayaan)

---

<sup>42</sup>Dr. Hamzah Hasan, M.H.I., *Hukum Pidana Islam I*, (Makassar : Alauddin University Press, 2014), h. 11.

adalah setiap perbuatan yang mengenai badan seseorang, namun tidak mengakibatkan kematian. Para *fuqaha* membagi tindak pidana tersebut menjadi lima bagian :<sup>43</sup>

1. Memisahkan anggota badan atau yang sejenisnya. Yaitu memotong anggota badan dan sesuatu yang mempunyai manfaat serupa, seperti memotong tangan, kaki, jari-jari, kuku, hidung, penis.
2. Menghilangkan manfaat anggota badan, tetapi anggota badannya tetap ada. Yaitu menghilangkan pendengaran, penglihatan, penciuman, perasa, manfaat bicara, termasuk di dalamnya merubah gigi menjadi hitam, merah, dan juga menghilangkan akal.
3. Melukai kepala dan muka (*al-shiijaj*), menurut imam Abu Hanifah adalah pelukaan bagian muka dan kepala, tetapi khusus di bagian tulang saja, seperti dahi.
4. Melukai selain kepala dan muka (*al-shiijaj*), yaitu selain kepala dan muka, dan ini terbagi menjadi dua :
  - a. *Al-ja'ifah*, yaitu luka yang sampai ke dalam rongga dada, perut, punggung, dua lambung, dan dubur.
  - b. *Ghair al-ja'ifah*, yaitu luka yang tidak sampai kerongga tersebut.
2. Yang tidak termasuk empat jenis di atas, yaitu penganiayaan yang tidak meninggalkan bekas atau meninggalkan bekas yang tidak dianggap *jarh* dan *shajjaj*.

Sebuah prinsip yang berlaku berdasarkan al-Qur'an untuk menghukum pelaku tindak kejahatan penganiayaan. Suatu kejadian, di mana terjadi tindak pembunuhan, di mana pihak korban dan pihak pelaku dalam status yang sama, maka pembunuhan terhadap pelaku merupakan hukuman akibat tindak

---

<sup>43</sup>Abd. Al-Qodir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, terj. Alie Yafie (dkk.) (Jakarta: PT. Khalista Ilmu, 2008), h. 19.

pembunuhan yang dilakukan terhadap korban, demikian pula penganiayaan ringan pada korban juga berakibat hukuman pelukaan yang setimpal atas pelakunya.

Hukum pidana Islam, yang memberikan pelukaan yang sama terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana ia melakukan (terhadap korban). Qishas hanya tertuju pada kejahatan yang menyangkut nyawa atau anggota badan seseorang. Jika seseorang melakukan penganiayaan terhadap orang lain secara sewenang-wenang, maka wali korban diberi hak untuk menuntut pula pelaku pidana tersebut.

Dalam hukum Islam ada kebijakan, yang mengesahkan penggantian hukuman, berdasarkan adanya pemaafan dari pihak korban dengan sejumlah ganti kerugian yang bersifat material untuk tindak kejahatan penganiayaan.<sup>44</sup> Di dalam hukum Islam secara eksplisit telah dijelaskan oleh Allah Swt dalam firman-Nya Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah/5:45 sebagai berikut :

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ ۖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahan :

<sup>44</sup>Ali As-Sahbuny, *Kamus Al-Qur'an : Quranic Explorer*, (Shahih, 8 Februari 2016), h.

“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”<sup>45</sup>.

(Dan telah Kami tetapkan terhadap mereka d dalamnya) maksudnya di dalam Taurat (bahwa jiwa) dibunuh (karena jiwa) yang dibunuhnya (mata) dicongkel (karena mata, hidung) dipancung (karena hidung, telinga) dipotong (karena telinga, gigi) dicabut (karena gigi) menurut satu qiraat dengan marfu'nya keempat anggota tubuh tersebut (dan luka-luka pun) manshub atau marfu' (berlaku kisas) artinya dilaksanakan padanya hukum balas jika mungkin; seperti tangan, kaki, kemaluan dan sebagainya. Hukuman ini walaupun diwajibkan atas mereka tetapi ditaqirirkan atau diakui tetap berlaku dalam syariat kita. (Siapa menyedekahkannya) maksudnya menguasai dirinya dengan melepas hak kisas itu (maka itu menjadi penebus dosanya) atas kesalahannya (dan siapa yang tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah) seperti kisas dan lain-lain (merekalah orang-orang yang aniaya).<sup>46</sup>

Di dalam Tawrât, Kami mewajibkan hukum kisas kepada orang-orang Yahudi agar Kami memelihara kelangsungan hidup manusia. Kami tetapkan bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung dan gigi dengan gigi. Luka-luka pun sedapat mungkin dikenakan kisas pula. Barangsiapa memaafkan dan menyedekahkan hak kisasnya terhadap pelaku kejahatan, maka sedekah itu merupakan kafarat yang dapat menghapus sebagian dosanya. Barangsiapa yang tidak menerapkan hukum kisas dan lain-lainnya yang

---

<sup>45</sup>Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Cet. X; Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2014), h. 115.

<sup>46</sup><https://tafsirq.com/5-Al-Ma'idah/ayat-45#tafsir-jalalayn>.

telah ditetapkan Allah, akan termasuk orang-orang yang zalim.<sup>47</sup>



---

<sup>47</sup><https://tafsirq.com/5-Al-Ma'idah/ayat-45#tafsir-quraish-shihab>.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Faktor penyebab seseorang melakukan tindakan main hakim sendiri karena adanya faktor emosional, faktor ikut-ikutan, kurang mempercayai aparat penegak hukum, faktor situasi.
2. Upaya penegak hukum dalam mengantisipasi/mencegah terjadi tindakan main hakim sendiri adalah para penegak hukum harus memberikan pemahaman mengenai hukum kepada masyarakat, memperbaiki sistem hukum pada saat ini dalam penerapannya, lembaga hukum dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus memperbaiki sistem kinerjanya.
3. Penerapan hukum pada masyarakat yang main hakim sendiri dalam perspektif hukum Islam itu sendiri sudah sangat jelas tercantum di dalam Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah/5:45 dan Hadits Rasulullah Saw "Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakr bin Abu Syaibah]; Telah menceritakan kepada kami [Hafsh bin Ghiyats] dari [Hisyam bin 'Urwah] dari [Bapaknya] dari [Hisyam bin Hakim bin Hizam] dia berkata; "Saya pernah melewati beberapa orang di Syam yang dijemur di terik matahari sedangkan kepala mereka dituangi minyak. Kemudian Hisyam bertanya; 'Mengapa mereka ini dihukum? Seseorang menjawab; 'Mereka disiksa karena masalah pajak.' Hisyam berkata; 'Sesungguhnya saya pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Sesungguhnya Allah akan menyiksa orang-orang yang menyiksa orang lain di dunia.'"

## **B. Implikasi**

1. Perlu adanya pengaturan yang tegas mengenai akibat hukum atas pelanggaran asas praduga tak bersalah, sehingga setiap penegak hukum tidak akan mengabaikan asas praduga tak bersalah selama proses peradilan.
2. Melakukannya peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga penegak hukum yang proporsional sehingga memenuhi persyaratan sumber daya manusia yang mampu melaksanakan dan mewujudkan proses peradilan pidana yang sesuai dengan kepastian hukum, adil dan benar.
3. Bagi tokoh agama dan juga tokoh masyarakat dapat memberikan pemahaman agama kepada masyarakat tentang larangan main hakim sendiri karena tindakan tersebut dosa, apalagi tindakan main hakim sendiri juga dapat menghilangkan nyawa orang lain dan hal itu tidak dibenarkan pada agama mana pun. Memberikan pemahaman seperti ini biasanya dinilai lebih mudah untuk dipahami dan diikuti oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui setiap perbuatan yang mereka lakukan apakah itu benar atau salah dimata agama dan dimata hukum.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009)
- Ali, as-Sahbuny, *Kamus Al-Qur'an : Quranic Explorer*, (Shahih, 8 Februari 2016)
- Arief, Barda Narwawi, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group)
- Audah, Abd. Al-Qodir, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, terj. Alie Yafie (dkk.) (Jakarta: PT. Khalista Ilmu, 2008)
- Hamzah, Andi, 1986, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia)
- , 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika)
- , *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Edisi Ke-2, (Jakarta : Cahaya Prima Sentosa, 2015)
- Hasan, Dr. Hamzah, M.H.I., *Hukum Pidana Islam 1*, (Makassar : Alauddin University Press, 2014)
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012)
- Imaning, Yusuf, *Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam*, (Palembang : Rafah Press, 2009)
- Jazuli, A, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000)
- Kancil, C.S.T., 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka)
- Kanter, E.Y., S.H., 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta : Alumni AHM-PTM)
- Kartanegara, Satochid, 1998, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, (Jakarta : Balai Lektur Mahasiswa)
- Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Cet. X; Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014)
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta : Liberty, 2007)
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta)
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004)
- Quthb, Sayyid, *Tafsir Fi Zilāl al-Qur'an*, terj. As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, dan Muchotob Hamzah, *Di Bawah Naungan al-Qur'an*.

-----, *Tafsir Fi Zilāl al-Qur'an*.

Rajagukguk, Erman, *Perlu Pembaharuan Hukum dan Profesi Hukum*, (Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Hukum, Suara Pembaharuan)

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986)

-----, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1990)

Soemantri, Sri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung : Alumni, 1992)

Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

Santoso, Topo, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Gem Insani)

Suyanto, Bagong & Sutinah, *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan*. (cet.3, Jakarta : Kencana, 2007)

Syahni, Abdul, 1987, *Sosiologi Kriminalitas*, (Bandung : Rejama Karya)

Soeroso, R., *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005)

Vandestra, Muhammad, *Kitab Hadist Shahih Bukhari & Muslim Edisi Bahasa Indonesia*.

## **UNDANG-UNDANG**

Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pencurian, Pasal 362.

Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Sanksi Hukum Bagi Pelaku Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang Di Muka Umum, Pasal 170.

Lihat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 4.

Lihat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 33 ayat (1).

## **WIBESIDE**

<http://www.muhammadiyah.or.id/9-content-190-det-tafsir-alquran.html>  
(di akses tgl 13 januari 2016)

Masjid nh.blogspot.co.id, Fenomena Main Hakim Sendiri, (di akses tanggal 4 April 2016)

<https://tafsirq.com/5-Al-Ma'idah/ayat-45#tafsir-quraish-shihab>

<https://tafsirq.com/5-Al-Ma'idah/ayat-45#tafsir-jalalayn>



Gambar I : Hakim Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa



Gambar II : Hakim Anggota Pengadilan Negeri Sungguminasa



Gambar III : Hakim Anggota Pengadilan Negeri Sungguminasa



Gambar IV : Warga Desa Manimbahoi Kecamatan Parigi





Gambar V : Kepala Desa Manimbahoi Kecamatan Parigi



Gambar VI : Kepala Dusun Pattiwo Desa Manimbahoi Kecamatan Parigi



Gambar VII : Warga Dusun Pattiro Desa Manimbahoi Kecamatan Parigi



Gambar VIII : Kepala Kecamatan Parigi





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Kampus II Jl. HM. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa Gowa  
 Tlp. (0411) 424835 Fax. 424836

Nomor : B- *BS* /SH.01/PP.00.9/01/2019

Samata, *OV* Januari 2019

Lamp : 1 (Satu) Proposal

Hal : Permohonan Izin Penelitian

**Kepada**  
**Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa**  
**di**  
**Sungguminasa**

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut dibawah ini :

Nama : Masykur Al-Farhiy  
 Nim : 10200114113  
 Fakultas : Syariah dan Hukum  
 Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan  
 Semester : IX (Sembilan)  
 Alamat : BTN Taman Sari Indah Kab. Gowa

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsinya :

***"Perbuatan Main Hakim Sendiri (Eigenrechting) Pada Masyarakat Kecamatan Parigi Desa Manimbahoi Dusun Pattiro Kabupaten Gowa (Perspektif Hukum Islam)"***

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Dr. Hamzah Hasan, M. H. I  
 2. Dr. Hj. Rahmatiah HL., M. Pd

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin untuk melakukan penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Sungguminasa terhitung mulai tanggal 10 Januari 2019 s/d 10 Februari 2019.

Demikian harapan kami, atas bantuan bapak di ucapkan terima kasih.



**Prof. Dr. Darussalam, M. Ag**



# PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA KELAS I A

JL. USMAN SALENGKE NO. 103 TELP (0411) 861129 - 861089

SUNGGUMINASA-KABUPATEN GOWA 92111

## SURAT KETERANGAN

Nomor : W22.U3/59 /HK/II/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas I A, Menerangkan Bahwa :

Nama : **MASYKUR AL-FARHIY**  
 Nomor Pokok : **10200114113**  
 Jenis Kelamin : **Laki-Laki**  
 Fakultas/Jurusan : **Syariah dan Hukum / Hukum Pidana dan Ketatanegaraan**  
 Alamat : **BTN Taman Sari Indah Kabupaten Gowa**

Telah melakukan penelitian pada Kantor Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas IA, dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **"Perbuatan Main Hakim Sendiri (Eigenrechting) Pada Masyarakat Kecamatan Parigi Desa Manimbahoi Dusun Pattiro Kabupaten Gowa (Perspektif Hukum Islam)"**

Demikian Surat ini dibuat dan diberikan kepada Peneliti tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Sungguminasa, 13 Februari 2019

PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA KELAS I A

PANITERA MUDA HUKUM

ABD. LATIF, SH.

NIP.19650920199003 1 002

Tembusan :

- Arsip





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Kampus II Jl. HM. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa Gowa  
 Tlp. (0411) 424835 Fax. 424836

Nomor : B- 734 /SH.01/PP.00.9/02/2019

Samata, 8 Februari 2019

Lamp : 1 (Satu) Proposal

Hal : Permohonan Izin Penelitian

**Yth. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan**  
**Cq. Kepala UPT P2t, BKPM D Prov. Sul-Sel**  
**di**  
**Makassar**

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut dibawah ini :

Nama : Masykur Al-Farhiy  
 Nim : 10200114113  
 Fakultas : Syariah dan Hukum  
 Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan  
 Semester : IX (Sembilan)  
 Alamat : BTN Taman Sari Indah Kab. Gowa

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsinya :

**"Perbuatan Main Hakim Sendiri (Eigenrechting) Pada Masyarakat**

**Kecamatan Parigi Desa Manimbahoi Dusun Pattiro Kabupaten Gowa (Perspektif Hukum Islam)"**

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Dr. Hamzah Hasan, M. H. I  
 2. Dr. Hj. Rahmatiah HL., M. Pd

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin untuk melakukan penelitian di Desa Manimbahoi Kec. Parigi Kab. Gowa terhitung mulai tanggal 8 Februari 2019 s/d 8 Maret 2019.

Demikian harapan kami, atas bantuan bapak di ucapkan terima kasih.



**Prof. Dr. Darussalam, M. Ag**  
**NIP. 19621016 199003 1 003**



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN**

Nomor : 11236/S.01/PTSP/2019  
 Lampiran :  
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.  
 Bupati Gowa

di-  
**Tempat**

Berdasarkan surat Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Nomor : B-734/SH.01/PP.00.9/02/2019 tanggal 08 Februari 2019 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **MASYKUR AL FARHIY**  
 Nomor Pokok : 10200114113  
 Program Studi : HPK  
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)  
 Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Samata Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**"Perbuatan Main Hakim Sendiri (Eigenrechting) Pada Masyarakat Kecamatan Parigi Desa Manimbahoi Dusun Pattiro Kabupaten Gowa (Perspektif Hukum Islam)"**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **12 Februari s/d 30 Maret 2019**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
 Pada tanggal : 11 Februari 2019

**A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU**  
**PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
 Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**A. M. YAMIN, SE., MS.**  
 Pangkat : Pembina Utama Madya  
 Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar di Makassar;





**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jln. Mesjid Raya No. 30. Telepon. 884637. Sungguminasa – Gowa

Sungguminasa, 13 Februari 2019

K e p a d a

Nomor : 070/120/BKB.P/2019

Yth. Camat Parigi

Lamp : -

Perihal : Rekomendasi Penelitian

Di-

T e m p a t.

Berdasarkan Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sul-Sel Nomor: 11236/S.01/PTSP/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang Rekomendasi Penelitian

Dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **MASYKUR AL FARHIY**  
 Tempat/Tanggal Lahir : Sumberjo, 27 Maret 1996  
 Jenis kelamin : Laki-Laki  
 Pekerjaan : Mahasiswa (S1)  
 Alamat : Jl. Macanda, BTN Taman Zarindah No. 7 Blok. 1

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyusunan Skripsi/Tesis di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul *“Perbuatan Main Hakim Sendiri (Eigenrechting) Pada Masyarakat Kecamatan Parigi Desa Manimbahoi Dusun Pattiro Kabupaten Gowa (Perspektif Hukum Islam)”*

Selama : 12 Februari s/d 30 Maret 2019  
 Pengikut : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa;
2. Penelitian/Pengambilan Data tidak menyimpang dari izin yang diberikan.;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) Eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Gowa Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.

**An. BUPATI GOWA**  
**KEPALA BADAN,**

**DRS. BAHARUDDIN.T**

Pangkat : Pembina Utama Muda

**Tembusan :**

1. Bupati Gowa (sebagai lampiran)

NLP : 19600124 197911 1 001

**PENGESAHAN DRAFT PROPOSAL**

Nomor: /HPK/2019

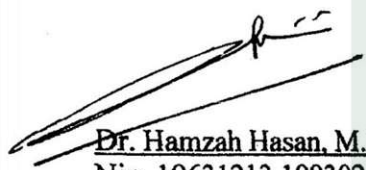
Judul Skripsi: **Perbuatan Main Hakim Sendiri (Eigenrechting) pada Masyarakat Kecamatan Parigi Desa Manimbahoi Dusun Pattiro Kabupaten Gowa (Perspektif Hukum Islam).**

Gowa, 8 Januari 2019

Penyusun

  
Masykur Al-Farhiy  
 NIM. 10200114113

Pembimbing I

  
Dr. Hamzah Hasan, M.Hi  
 Nip. 19631213 199302 1 003

Pembimbing II


  
Dr. Hj. Rahmatiah HL, M.Pd  
 Nip. 19690606 199403 2 003

Diketahui Oleh:

Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

  
Dra. Nila Sastrawati, M.Si  
 Nip. 19710712 199703 2 002

Disahkan Oleh:

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**  
**UIN Alauddin Makassar**
  
Prof. Dr. Darussalam, M.Ag  
 Nip. 19621016 199003 1 003

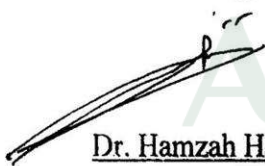
### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Masykur Al-Farhiy NIM : 10200114113**, Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, setelah dengan saksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul **Perbuatan Main Hakim Sendiri (Eigenrechting) pada Masyarakat Kecamatan Parigi Desa Manimbahoi Dusun Pattiro Kabupaten Gowa (Perspektif Hukum Islam)**. Memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Samata, 28 Februari 2019

Pembimbing I



Dr. Hamzah Hasan, M.H.I  
Nip: 197312312005011034

Pembimbing II



Dr. Hj. Rahmatiah HL, M.Pd  
Nip: 19730710 2000031004



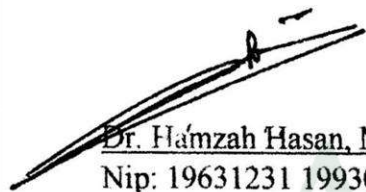
### PENGESAHAN PEMBIMBING/PENGUJI

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Masykur Al-Farhiy NIM : 10200114113**, Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, setelah dengan saksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul **Perbuatan Main Hakim Sendiri (Eigenrechting) pada Masyarakat Kecamatan Parigi Desa Manimbahoi Dusun Pattiro Kabupaten Gowa (Perspektif Hukum Islam)**. Memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang ujian Munaqasah (Akhir).

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.


Samata, 12 Maret 2019

**Pembimbing I**



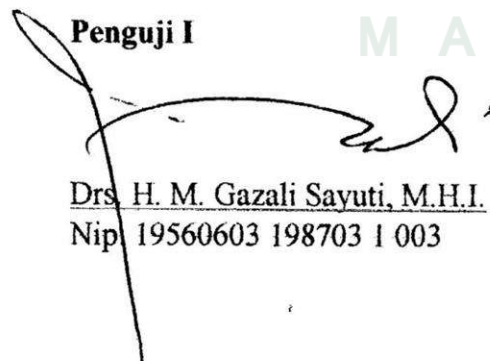
Dr. Hamzah Hasan, M.H.I.  
Nip: 19631231 199302 1 003

**Pembimbing II**



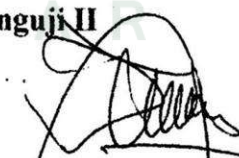
Dr. Hj. Rahmatiah HL, M.Pd.  
Nip: 19730710 200003 1 004

**Penguji I**



Drs. H. M. Gazali Sayuti, M.H.I.  
Nip: 19560603 198703 1 003

**Penguji II**



Subhan Khalik, S. Ag., M. Ag.  
Nip: 19701018 199703 1 002

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Masykur Al-Farhiy** dilahirkan di Sumberjo, Sulawesi Barat pada tanggal 27 Maret 1996, penulis merupakan anak ke 2 dari 2 bersaudara, anak dari Ayahanda Jus. Kuswanto dan Ibunda Musdalifah, penulis memulai pendidikan di Sekolah Dasar 013 Sumberjo, setelah tamat SD pada tahun 2008, penulis melanjutkan pendidikan di MTS Mas'udiyah Wonomulyo hingga tahun 2011, kemudian pada tahun tersebut penulis melanjutkan pendidikan di SMK YPPP Wonomulyo hingga tahun 2014, setelah tamat penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM), Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan. Selama berkuliah penulis pernah berkecimpung di dunia organisasi baik intra maupun ekstra kampus diantaranya Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, sedangkan Organisasi ekstra adalah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Syariah dan Hukum, Komunitas Perpustakaan Rakyat Rumah Belajar Paradox, dan Komunitas Literasi Lima. Kemudian penulis menyelesaikan studi dengan Skripsi yang berjudul "Perbuatan Main Hakim Sendiri (Eigenrechting) pada Masyarakat Kecamatan Parigi Desa Manimbahoi Dusun Pattiro Kabupaten Gowa (Perspektif Hukum Islam)" untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.